

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM E-PLANNING
DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DI PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA	: MUHAMMAD QURBANI
NOMOR MAHASISWA	: 197121087
BIDANG KAJIAN UTAMA	: ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
BKU ADMINSTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM *E-PLANNING*
DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD QURBANI

NPM : 197121087

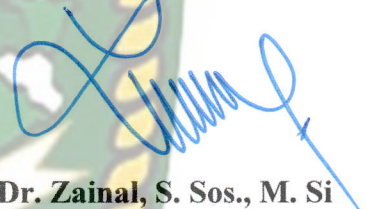
TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM

Sekretaris



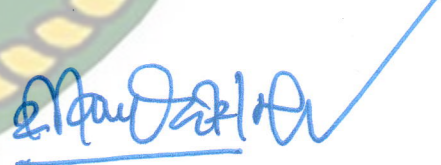
Dr. Zainal, S. Sos., M. Si

Anggota I



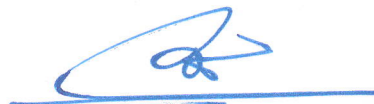
Dr. H. A Tarmizi Yussa, M.A

Anggota II



Dr. Annisa Mardatillah, S. Sos., M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM *E-PLANNING*
DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

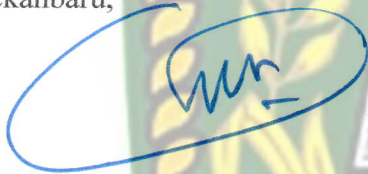
Nama : MUHAMMAD QURBANI

NPM : 197121087

Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru,



Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM

Pembimbing II
Pekanbaru,



Dr. Zainal, S. Sos., M. Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Qurbani
NPM : 197121087
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Usulan Penelitian : Efektifitas Penggunaan Sistem *e- Planning* Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Tesis ini adalah benar karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang saya telah ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Januari 2022
Pembuat Pernyataan



Muhammad Qurbani



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 003/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **MUHAMMAD QURBANI**

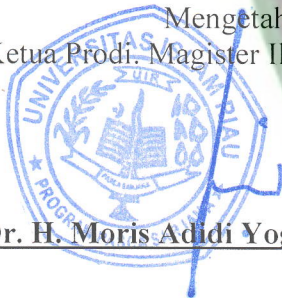
NPM : **197121087**

Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Adidi Yogja, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 04 Januari 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Jan-2022 10:16 WIB
ID: 1737282836
Word Count: 20973
Submitted: 1

Similarity Index

26%

Similarity by Source

Internet Sources:	25%
Publications:	3%
Student Papers:	9%

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK
PENGGUNAAN SISTEM E- PLANNING DALAM
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DI PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI By
Muhammad Qurbani

Blitar)", 2018

8% match ()

Nuravita, Winda. "Penerapan E-Planning dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

3% match (Internet from 10-Dec-2020)

<http://repository.uinsu.ac.id/10064/1/SKRIPSI%20RAHMADANI-EKI.pdf>

2% match ()

Mhd Asrofi. ""ANALISIS FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"" , 2013

2% match (Internet from 10-Sep-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/11723186.pdf>

1% match (Internet from 25-Mar-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29632?show=full>

1% match (Internet from 24-Aug-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29631/160903015.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 24-Jul-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5802/140903005.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 26-Dec-2019)

<http://repository.uin-suska.ac.id/16400/6/8.%20BAB%20I.pdf>

1% match (student papers from 29-Jan-2020)

Submitted to Universitas Nasional on 2020-01-29

1% match (student papers from 03-Oct-2020)

Submitted to Universitas Nasional on 2020-10-03

1% match (Internet from 23-May-2021)

<https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/download/897/1415>

1% match (Internet from 28-Jun-2019)

[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/pin_emby_Implementasi%20\(01-09-17-03-34-15\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/pin_emby_Implementasi%20(01-09-17-03-34-15).pdf)

1% match (Internet from 19-Oct-2021)

http://eprints.polbeng.ac.id/1904/4/LKP_LISA%20DUWI%20NIATI%20PUTRI_FULL%20TEXT.pdf

1% match (Internet from 18-May-2020)

<https://es.scribd.com/document/357371067/Permendagri-No-5-Thn-2017-pdf>

1% match (student papers from 22-Jul-2013)

Submitted to Universitas Negeri Makassar on 2013-07-22

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1288/1/Fiza%20Ismanati%20-%20I.pdf>

1% match (Internet from 06-Aug-2019)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/54196/Chapter%20II.pdf;sequence=3>

1% match (Internet from 24-May-2016)

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14705/SKRIPSI%20 LENGKAP_FIRDAYANTI%20RUSLAN.pdf?sequence=1

1% match (student papers from 28-Sep-2020)

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang on 2020-09-28

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PENGGUNAAN SISTEM E- PLANNING DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau OLEH : NAMA : MUHAMMAD QURBANI NOMOR MAHASISWA : 197121087 BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI BKU ADMINISITRASI PUBLIK UNIVERSITASI ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PENGGUNAAN SISTEM E- PLANNING DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ABSTRAK Perencanaan dalam pembangunan daerah adalah suatu kegiatan atau proses dalam mempersiapkan secara

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 020/KPTS/PPs-UIR/2022

TENTANG

**PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Muhammad Qurbani** tanggal 11 Januari 2022 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 03 September 2021
10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 653/KPTS/PPs-UIR/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

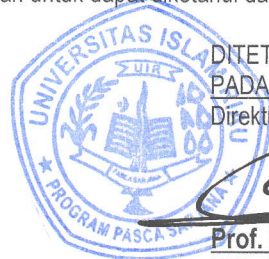
Nama : **MUHAMMAD QURBANI**

N P M : **197121087**

Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Judul Tesis Baru : **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM E-PLANNING DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 12 Januari 2022

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul "Efektifitas Penggunaan Sistem *E-Planning* dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti" ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Orang tua, Istri dan keluarga karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., MA yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf,SH,M.Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pasca sarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalankan studi.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Zainal, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang memberikan arahan bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Allah Subhanawata'ala semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Kebajikan, aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

Ttd

Muhammad Qurbani



**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM *E-PLANNING* DALAM
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

ABSTRAK

Perencanaan dalam pembangunan daerah adalah suatu kegiatan atau proses dalam mempersiapkan secara sistematis dan terusun, tahapan-tahapan penyusunan tersebut ialah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mengikuti atau menyesuaikan dengan pedoman-pedoman pelaksanaan. Salah satu aspek penting dari keberhasilan pembangunan itu dapat terjadi dengan efisien dan efektif, sejak dimulainya penerapan sistem *e-planning* di Pemerintah Kabupaten Meranti di Tahun 2017, Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang mengkoordinir penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang wajib menggunakan aplikasi perencanaan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan *e-planning* dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan sistem *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait *e-planning* di Bappeda Kabupaten Meranti.

Melalui penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa, Efektifitas *Electronic Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah berjalan dengan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari tanggapan beberapa staff Bappeda Kabupaten Meranti yang merasa puas dengan perencanaan berbasis *e-planning*, dengan adanya *e-planning* tahapan penyusunan rencana pembangunan menjadi lebih tertib dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta mudah dalam melakukan *monitoring*. *E-planning* memiliki banyak manfaat dan keuntungan, selain itu adanya Tim Teknis yang dibentuk oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penerapan *e-planning* ini berjalan cukup efektif namun masih adanya kekurangan, di antaranya sering terjadi *server down* atau gangguan jaringan yang membuat menjadi kendala disaat penginputan pengusulan rencana kerja. Hal itu disebabkan kelebihan muatan dalam mengakses website *e-planning*, sehingga sering terjadi kendala dalam penginputan. Dengan solusi untuk lebih memperluas muatan akses website agar tidak terjadinya *server down* atau gangguan jaringan ketika sedang pada masa tahapan penginputan usulan rencana kerja perangkat daerah.

Kata Kunci : Efektifitas, *e-planning*, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti

THE EFFECTIVENESS OF USING THE E-PLANNING SYSTEM IN THE DEVELOPMENT PLANNING DOCUMENT IN THE GOVERNMENT OF MERANTI ISLANDS

ABSTRACT

Planning in regional development is an activity or process in preparing systematically and continuously, the stages of preparation are development plans that will be carried out by following or adjusting to implementation guidelines. One important aspect of successful development that can occur efficiently and effectively, since the implementation of the *e-planning* system in the Meranti Regency Government in 2017, Bappeda is a Regional Apparatus that coordinates the preparation of regional development plans that are required to use an electronic-based planning application or commonly called with e-planning in preparing regional development planning documents.

This study aims to determine the effectiveness of using the *e-planning* system in the preparation of annual development planning documents in the Meranti Islands Regency Government. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, and documentation related to e-planning at the Bappeda of Meranti Regency.

Through the research conducted, it can be seen that the effectiveness of Electronic Planning in Regional Development Planning by the Regional Development Planning Agency has been running quite effectively, this can be seen from the responses of several Bappeda Meranti Regency staff who are satisfied with e-planning-based planning, with the existence of e-planning. - planning the stages of preparing the development plan to be more orderly and in accordance with the specified time, and easy to monitor. E-planning has many benefits and advantages, apart from that there is a Technical Team formed by Bappeda of Meranti Islands Regency. The implementation of e-planning is quite effective, but there are still shortcomings, including frequent server downs or network disturbances which make it an obstacle when inputting work plan proposals. This is due to overload in accessing the e-planning website, so there are often problems with inputting. With a solution to further expand the content of website access so that there will be no server downs or network disturbances when it is in the inputting stage of the proposed work plan of regional apparatus.

Keywords : Effectiveness, e-planning, Regional Development Planning, Meranti Islands Regency

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTARCT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1. Konsep Administrasi Publik	12
2.1.2. Konsep Organisasi Publik	16
2.1.3. Konsep Manajemen.....	16
2.1.4. Konsep Efektifitas.....	18
2.1.4.1. Kriteria Mendeskripsikan Efektifitas Organisasi	20
2.1.4.1.1. Pendekatan Menurut Lubis dan	
Martani Huseini	20
2.1.4.1.2. Pendekatan Menurut Quinn dan	
Rorhbaugh.....	22
2.1.5. Konsep Perencanaan Pembangunan.....	24
2.1.6. Konsep <i>E-Government</i>	27
2.1.6.1. Pengertian <i>E-Government</i>	27
2.1.6.2. Konsep dan Prinsip <i>E-Government</i>	27
2.1.6.3. Manfaat <i>E-Government</i>	28
2.1.7 Konsep Partisipasi	29
2.1.8. Sistem <i>E-Planning</i>	31
2.1.8.1. <i>E-Planning</i> Kabupaten Kepulauan Meranti.....	34
2.2 Kerangka Pemikiran	35
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	38
2.4 Konsep Operasional.....	51
2.5 Operasionalisasi Variabel.....	53
2.6 Teknik Pengukuran.....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tipe/Jenis Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Populasi dan Sampel	58
3.4 Teknik Penarikan Sampel	59
3.5 Jenis dan Sumber Data	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	59

3.7	Teknik Analisa Data.....	61
3.8	Jadwal Kegiatan Penelitian	62
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Meranti	63
4.2	Struktur Organisasi.....	64
4.3	Fungsi dan Tugas Organisasi.....	67
4.3.1.	Uraian Tugas (Job Description) Bagian Unit Kerja BAPPEDA	68
4.4	Sumber Daya Organisasi	75
4.4.1	Sumber Daya Manusia	75
4.4.2	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	77
4.4.3	Sarana dan Prasaran Pelaksanaan <i>e-planning</i> Kabupaten Meranti	78
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN		
5.1	Identitas Responden.....	80
5.2	Analisis dan Hasil Penelitian.....	81
5.2.1	Efektivitas penerapan sistem <i>e-planning</i> dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti.....	83
5.3	Pembahasan	98
5.3.1	Efektivitas penerapan sistem <i>e-planning</i> dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti.....	98
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
6.1	Kesimpulan.....	107
6.2	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti	5
1.2	Jumlah pengguna sistem <i>E-planning</i> di BAPPEDA Kabupaten Meranti ...	5
1.3	Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan daerah Kabupaten Meranti.....	7
2.1	Delapan Tingkat Partisipasi.....	30
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu	38
2.3	Operasionalisasi Variabel.....	53
4.1	Pembagian ASN BAPPEDA Kepulauan Meranti berdasarkan Jabatan.....	76
4.2	Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Golongan.....	76
4.3	Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
4.4	Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan	77
4.5	Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kepulauan Meranti	78
5.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
5.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	80
5.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	81
5.4	Klasifikasi Identitas Responden	81



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	37
4.1	Struktur Organisasi	65
4.2	Sarana dan Prasarana pelaksanaan <i>e-planning</i>	79
5.1	Alur Kinerja Sistem Informasi Manajemen <i>E-Planning</i>	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah mendapatkan kewenangan yang besar untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri yang sering disebut Otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya transisi atau perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan bahwa otonomi daerah telah memberikan cara baru dalam proses pemerintahan daerah dalam meletakkan kewenangan dan tanggungjawab yang besar kepada pemerintah daerah. Kewenangan dan tanggungjawab yang besar ini diharapkan mampu memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan potensi daerah melalui pembangunan daerahnya masing-masing.

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan pembangunan daerah yaitu dengan adanya perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan tersebut disusun oleh badan atau satuan kerja yang baik. Agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibentuklah suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat sumber daya yang dimiliki. Selain itu Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjaminnya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga dapat diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mengingat setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya (Setianingsih, 2015: 1931).

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dalam pasal 30 ayat 1 mengatakan “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah”. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam

ranah perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan yang ideal di era otonomi daerah ini diwujudkanlah pemerintahan yang biasa disebut dengan *e-government*.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah makin tinggi baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan potensi yang ada. Agar dapat melaksanakan hak dan tanggungjawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *good governance*.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang handal dan terpercaya untuk mendorong pembentukan *good governance* pada pemerintahan. (https://www.bappenas.go.id/files/8913/6508/2376/perkembangan-e-government-di-indonesia---oleh-bastian_20081223152111_1660_0.pdf, diakses pada 17 Oktober 2021 Pukul 13:00 WIB).

Maka dapat dikatakan bahwa terbentuknya perencanaan yang ideal maka pemerintah harus mampu menerapkan sistem informasi manajemen dalam pemerintahan, didukung dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 391 tentang pemerintah daerah wajib menyediakan informasi daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah). Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang terdapat pada pasal 14 ayat (3) tentang penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan secara *e-planning*. Sehingga melalui rancangan pembangunan tersebutlah yang akan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembangunan serta menjalankannya sesuai dengan tugas pokok fungsi (Tupoksi) dari Organisasi Perangkat Daerah (ODP) tersebut.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerapkan *Electronic Government* di dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Penerapan *E-Government* di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diterapkan sejak pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendiri yakni mulai efektif sejak tahun 2009 yang saat ini di bawah pengelolaan Bagian Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mengakses informasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diakses melalui website www.merantikab.go.id.

Dalam menerapkan *E-government* pada urusan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam menyusun dokumen perencanaan pada tahun 2017 mulai menerapkan penyusunan dokumen

perencanaan menggunakan *electronic planning* atau *E-planning* melalui terbitnya Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2017 tentang pelaksanaan sistem *e-planning* Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Wilayah	Jumlah
1	Kecamatan	9
2	Kelurahan	5
3	Desa	96

Sumber Data: BAPPEDA Kepulauan Meranti

Berbagai program kegiatan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat lingkungan hingga tingkat kecamatan dapat di pantau oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Meranti. Aplikasi *e-planning* atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif, efisien dan terintegrasi. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sampai saat ini jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Meranti sebanyak 47 orang dengan rincian:

Tabel 1.2. Jumlah pengguna sistem *E-planning* di BAPPEDA Kabupaten Meranti

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Bappeda	12 Pengguna
2	OPD	35 Pengguna
	Jumlah	47 Pengguna

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Meranti

Dalam pengaplikasian sistem *e-planning* sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun ini memang sudah dapat membantu kinerja. Namun sepanjang perjalanan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan

menggunakan sistem *e-planning*, tentu ada beberapa kendala yang ditemukan baik teknis maupun non teknis. Diantaranya keterlambatan menginput data sehingga *e-planning* tersebut belum digunakan secara optimal.

Secara umum proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat difokuskan menjadi beberapa tahapan penting yaitu:

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Penyampaian Surat Edaran KDH tentang Penyempurnaan Ranwal Renja PD kepada Perangkat Daerah
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
4. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
7. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Secara umum seluruh tahapan dapat difokuskan menjadi 7 tahapan penting yang seharusnya tidak boleh terlambat atau tidak dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja ada beberapa tahapan yang terlambat dilaksanakan atau bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Berikut data capaian tahapan pada 3 tahun terakhir:

Tabel 1.3. Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan daerah Kabupaten Meranti

No	Nama Tahapan	Jadwal sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	Penyusunan RKPD 2019		Penyusunan RKPD 2020		Penyusunan RKPD 2021	
			Waktu	Ket	Waktu	Ket	Waktu	Ket
1	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Paling Lambat Minggu kedua pada bulan Februari	5 s/d 15 Feb 2018	Sesuai	11 s/d 22 Feb 2019	Sesuai	3 s/d 17 Feb 2020	Sesuai
2	Penyampaian Surat Edaran KDH tentang Penyempurnaan Ranwal Renja PD kepada Perangkat Daerah	Minggu kedua pada bulan Februari	14 Feb 2018	Sesuai	12 Feb 2019	Sesuai	10 Feb 2020	Sesuai
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Paling Lambat dua minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah	21 s/d 23 Maret 2018	Tidak Sesuai	19 s/d 21 Maret 2019	Tidak Sesuai	17 s/d 19 Maret 2020	Sesuai
4	Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD	Paling Lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang	26 Maret 2018	Tidak Sesuai	4 Maret 2019	Sesuai	5 Maret 2020	Sesuai
5	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten	Minggu Pertama Bulan April	26 Maret 2018	Sesuai	27 Maret 2019	Sesuai	20 Maret 2020	Sesuai
6	Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Paling Lambat Akhir Bulan Juni	29 Juni 2018	Sesuai	8 Juli 2019	Tidak Sesuai	25 Agustus 2020	Tidak Sesuai
7	Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada RKPD	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	5 Agustus 2019	Sesuai	31 Agustus 2020	Sesuai

Sumber : Laporan LKJIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari 7 fokus tahapan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 4 tahapan terlaksana dengan tepat waktu, 2 tahapan tidak terlaksana tepat waktu dan 1 tahapan tidak dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2019, 5 tahapan terlaksana tepat waktu dan tahapan dilaksanakan tidak tepat waktu sedangkan tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa 6 tahapan terlaksana dengan tepat waktu dan 1 tahapan terlaksana tetapi tidak tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut dapat menggambarkan bahwa setiap tahun ada peningkatan pelaksanaan tahapan tepat waktu, akan tetapi masih ada tahapan yang belum dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Saat masa pandemi Covid-19 ini yang telah memberikan dampak besar di Indonesia bahkan di dunia sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang. Sejak pandemi Covid-19 ini berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), *Lockdown* (Karantina Wilayah) dan *Physical Distancing* (Pembatasan Fisik) dengan memperhatikan jaga jarak antar individu minimal 1 meter. Kebijakan pembatasan juga diterapkan dikantor dengan menerapkan sistem kerja dimana pegawai berkerja dari rumah yang dikenal dengan WFH atau *Work From Home*. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan seluruh pemerintahan dan perusahaan swasta untuk memberlakukan pekerja melakukan pekerjaan dari rumah, dan ada juga yang di kantor tetapi tidak boleh melebihi peraturan yang telah dibuat. Penerapan *e-planning* ini sangat membantu kinerja BAPPEDA Kabupaten Meranti dikarenakan asistensi dan supervisi nya dapat dilakukan secara daring tanpa harus

tatap muka. Sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara efektif, efisien serta berkualitas..

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas penggunaan Sistem *e-Planning* dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Dengan kemajuan teknologi ini maka suatu perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diharapkan dapat menjadi efektif, efisien serta berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Berbagai kegiatan perekonomian dapat berjalan lebih baik serta mampu menambah tingkat pendapatan masyarakat dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai efektifitas kebijakan publik dalam penerapan sistem *e-planning* untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikemukakan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana efektifitas penggunaan sistem *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Apa saja hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penulisan kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan sistem *e-planning* dalam penyusunan perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penggunaan sistem *e-planning* dalam penyusunan perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah yang menjadi penghambat dalam penggunaan sistem *e-planning* dalam penyusunan perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu, khususnya disiplin Ilmu Administrasi Publik terkait penerapan sistem *e-planning* pada Pemerintahan Daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat mengetahui

bagaimana penerapan sistem *e-planning* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai tambahan ilmu bagi peneliti sendiri dalam mengkaji efektifitas penggunaan *e-planning* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, maka seorang peneliti tidak akan bisa terlepas dari teori-teori yang sebelumnya telah ditemukan oleh beberapa ahli. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi sesuatu sehingga teori merupakan suatu alat yang sangat vital yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Untuk itu pada Bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah fektifitas, diantaranya: Teori efektifitas untuk menganalisis penerapan sistem *electronic planning* yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Secara terminologi yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Menurut Faried Ali, Administrasi adalah Kerjasama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Ilmu Administrasi pada intinya merupakan alat pelayanan untuk mencapai tujuan, teori instrumental menjelaskan bahwa ilmu administrasi merupakan instrument sebagai konseptualisasi mengenai cara untuk memperbaiki pelayanan

publik dan memuaskan pengguna administrasi. Hal ini berarti bahwa ilmu administrasi sebagai instrument untuk menghasilkan sebuah tindakan layanan dalam rangka keberpihakan dan pemuasan kepentingan publik.

Pengertian administrasi sangat luas dan dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu:

1. Dari sudut proses, administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sampai proses pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai.
2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi dan sebagainya.
3. Dari sudut kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Orang-orang itu sendiri terdiri atas empat golongan, yaitu:
 - a. Administrator adalah julukan orang yang menentukan dalam mempertahankan tujuan.
 - b. Manajer adalah julukan orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata.
 - c. Pembantu ahli (staf) terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (brain-trust) dan berfungsi di bidang pemikiran.

- d. Karyawan: para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Menurut Dimock (Keban, 2004:5) Administrasi Publik adalah produksi barang atau jasa yang dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Dalam definisi tersebut mempunyai makna tersirat ialah administrasi publik sama dengan kegiatan ekonomi dan rupa yang dihasilkan ialah barang dan pelayanan publik.

Sedangkan menurut Barton dan Chappel, Administrasi Publik sebagai *the work of Government* atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah (dalam Keban, 2004:5). Dalam definisi tersebut menekankan bahwa kontribusi personel dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik merupakan semua hal yang dicapai pemerintah dan dilakukan pilihan sesuai dengan janji pada waktu kampanye pemilihan, hal ini dikemukakan oleh Starling (Keban, 2004: 5). Administrasi juga sebuah pencapaian pemerintah atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan-kebijakan sebagaimana halnya seperti yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of gonerment* dan seleksi kebijakan publik.

Definisi cukup lengkap seperti dikemukakan oleh Felix A Nigro dan Loyd G Nigro (dalam Syafii dkk, 1999: 25) menjelaskan administrasi publik adalah:

1. Suatu kerjasama kelompok dalam pemerintahan.
2. Mencakup tiga cabang elemen pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.

3. Mempunyai peranan yang penting dalam formulasi kebijakan dan bagian dari proses politik.
4. Berhubungan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Terdapat sejumlah perbedaan yang penting dengan administrasi privat.

Administrasi publik merupakan gabungan antara teori dan praktek dengan adanya yang mengkombinasikan proses manajemen dan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat. Hal ini seperti dikemukakan oleh Nicholas Henry (dalam Kaban, 2004:5) bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan secara baik.

Dari beberapa definisi dan batasan Administrasi publik ada beberapa hal penting disimpulkan sebagai berikut :

1. Lokusnya pada eksekutif, tetapi ada hubungannya dengan yudikatif dan legislatif.
2. Berkaitan dengan tahap-tahap kebijakan publik yang meliputi formulasi dan implementasi kebijakan publik.
3. Berkaitan dengan proses kerjasama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
4. Kegiatannya menghasilkan berupa barang dan jasa
5. Mempunyai aspek praktis dan teoritis.

2.1.2. Konsep Organisasi Publik

Organisasi erat kaitannya dengan disiplin Ilmu Administrasi, karena Ilmu Administrasi akan terpusat pada penelaahan tentang organisasi. Peneliti akan menguraikan beberapa pengertian dan definisi organisasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008:7). Siagian mendefinisikan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama atau secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang atau yang disebut atasan dan seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Definisi di atas menyatakan bahwa organisasi memerlukan dua orang atau lebih yang bekerjasama secara ikhlas dan sukarela secara terikat di suatu badan atau lembaga pemerintahan yang terdapat atasan dan bawahan yang kemudian ditentukan penempatan tujuan yang jelas yakni tujuan ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut.

2.1.3. Konsep Manajemen

Ricky W. Griffin dalam Indriyo Gitosudarmo (1996) dalam Nurman (2015:2) mendefinisikan manajemen: sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal.

Indriyo Gitosudarmo (1996) dalam Nurman (2015:2) menyebutkan istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Manajemen sebagai suatu proses;
2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen;
3. Manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (science).

Sudarwan dan Yunan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama, yaitu merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading) dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Untuk mencapai efisiensi serta efektifitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Untuk itu diperlukan berbagai hasil akhir spesifik tentu saja harus unik bagi masing-masing organisasi.

Uber Silalahi (2002:4) mengungkapkan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pimpinan dan pengontrolan untuk

optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Secara prinsip dapat dilihat bahwa pada kenyataannya manajemen merupakan kombinasi ilmu dan seni serta tidak dalam proporsi yang tetap, tetapi dalam proporsi yang bermacam-macam. Konsep manajemen merupakan suatu konsep yang mencerminkan adanya kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam organisasi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen adalah koordinasi yang dilakukan dalam organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam pembahasannya fungsi manajemen dapat disederhanakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. George R. Terry (2006) dalam bukunya “Principles of Management” merumuskan fungsi manajemen dengan singkatan POAC yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*).

2.1.4. Konsep Efektifitas

Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan (Handoko 2000:50).

Sedangkan menurut Septi Winarsih, Rahminto (2005:179) Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus mengacu pada visi organisasi.

Efektifitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan (Kumorotomo, 2005:362).

Selanjutnya Menurut Richard M. Steers (2000:159) bahwa Efektifitas organisasi mudah di mengerti bila di pandang sebagai kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya adalah:

1. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan),
2. Produktifitas,
3. Kemampuan Kerja,
4. Kemampuan berlabab,
5. Mencari sumber daya,
6. Kualitas kerja.

Lubis dan Huseini (1987:55) menyatakan bahwa: “Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2006:61) Efektivitas merupakan suatu rumusan yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan pandangan Steers, menurut Steers (Sutrisno, 2010: 223) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektifitas yaitu memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan:

1. Optimalisasi tujuan,
2. Perspektif sistem, dan
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Berdasarkan pandangan Steers, efektifitas organisasi tidak melulu tentang pencapaian tujuan dari suatu organisasi, tetapi juga tentang bagaimana perilaku manusia dalam organisasi tersebut serta bagaimana organisasi berhubungan dengan lingkungannya.

2.1.4.1. Kriteria Mendeskripsikan Efektifitas Organisasi

2.1.4.1.1. Pendekatan Menurut Lubis dan Martani Huseini

Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi analisa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya Lubis dan Huseini (1987:55), menyatakan: perumusan efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Berikut tiga pendekatan utama dalam perumusan efektivitas organisasi:

- a. **Pendekatan Teknis**, pendekatan teknis memungkinkan para manajer melihat efisiensi organisasi yang mengubah beberapa *skill* organisasi dan sumber daya menjadi barang dan jasa. Keefektivan teknis diukur berdasarkan

produktifitas dan efisiensi (rasio *input* terhadap *output*). Demikianlah peningkatan jumlah unit yang dihasilkan tanpa memanfaatkan pegawai tambahan menunjukkan perolehan dalam produktivitas, dan juga penghematan biaya pegawai dan material yang dibutuhkan di tiap unit *output*.

- b. **Pendekatan Sumber Daya Eksternal**, pendekatan sumber daya eksternal memungkinkan para manajer untuk melihat kemampuan organisasi dalam mengatur dan mengendalikan lingkungan luarnya. Misalnya, kemampuan organisasi untuk mempengaruhi persepsi pihak luar tentang selera dan menerima evaluasi positif oleh pihak luar adalah penting bagi kelangsungan manajer dan organisasi. Dengan cara yang sama, kemampuannya dalam memanfaatkan lingkungannya dan mengamankan sumber daya langka dan berharga adalah indikator lain tentang keandalan atas lingkungan tersebut.
- c. **Pendekatan Sistem-sistem Internal**, pendekatan sistem-sistem internal memungkinkan para manajer melihat seberapa baik organisasi tersebut bekerja dan berfungsi. Supaya efektif ia membutuhkan struktur dan kultur yang mempercepat adaptasi dan cepat merespon perubahan kondisi lingkungan dan juga membutuhkan fleksibilitas sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan dan penemuan barang dan jasa baru. Beberapa pengukuran kemampuan organisasi meliputi lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat keputusan, memasarkan produk baru, dan mengkoordinasikan bagian yang berbeda.

Berdasarkan tiga pendekatan utama dalam perumusan efektivitas organisasi di atas perumusan efektivitas dapat dinilai dari produktivitas dan

efisiensi organisasi tersebut, dengan melihat bagaimana organisasi tersebut mengatur dan mengendalikan lingkungan luar serta kemampuan organisasi dalam hal pengambilan keputusan. Untuk menilai organisasi tersebut efektif atau tidak secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi tercapai dengan baik atau sebaliknya.

2.1.4.1.2. Pendekatan Menurut Quinn dan Rorhbaugh

Quinn dan Rorhbaugh (dalam Azhar Kasim 1983:86) mengusulkan empat model atau perspektif dari kriteria efektivitas organisasi yaitu:

- a. **Model Tujuan Rasional**, didasarkan bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh pemilik organisasi yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang mempunyai legitimasi terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor bisnis yang menjadi pemilik organisasi adalah pemilik modal atau pemegang saham. Berbeda dengan sektor publik misalnya birokrasi (organisasi) pemerintahan yang menjadi pemiliknya adalah publik (masyarakat). Dalam sistem ini menekankan pada produktivitas dan efisiensi. Azhar Kaim mengatakan bahwa tujuan organisasi ini terdiri dari tujuan-tujuan resmi dan tujuan-tujuan operasi. Kebanyakan organisasi besar mempunyai kecenderungan untuk mempunyai tujuan-tujuan ganda dan saling bertentangan, dan konflik antara tujuan resmi. Model tujuan rasional menekankan kepada birokrasi dan manajemen ilmiah, konsep tujuan organisasi, perumusan tujuan, perencanaan, evaluasi, produktivitas dan efisiensi.
- b. **Model Hubungan Manusia**, model ini menekankan pada segi moral dan kekompakannya dari anggota organisasi. Efektivitas organisasi dilihat dari

kacamata pegawai yaitu sampai seberapa jauh mereka merasakan manfaat organisasi untuk kesejahteraan mereka.

Dalam Azhar Kasim (1983) Steers mengatakan bahwa pemberian tekanan terhadap aspek prestasi kerja pegawai (buruh) dan perlakuan terhadap pegawai yang lebih manusiawi ini sebagai gerakan hubungan manusia. Model hubungan manusia memfokuskan pada kepemimpinan, perilaku organisasi pada umumnya dan pengelolaan konflik dalam organisasi.

- c. **Model Sistem Terbuka**, model ini membahas bagaimana pemahaman terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup organisasi, serta pemikiran tentang strategi yang mungkin dapat digunakan untuk menghadapi dan mempengaruhi lingkungan organisasi. Pada model sistem terbuka memfokuskan pada organisasi. Lingkungannya, ekologi, populasi organisasi, ketergantungan sumber daya, usaha pengelolaan ketergantungan terhadap sumber daya, dan strategi untuk pengendalian lingkungan organisasi.
- d. **Model Proses Internal**, proses internal dalam suatu organisasi mencakup proses pengelolaan informasi, komunikasi, partisipasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan serta proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, strategi dan teknik pembuatan keputusan. Dalam hal ini pengelolaan informasi merupakan fungsi pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi. Efektivitas komunikasi tergantung pada seberapa jauh kelengkapan atau ketepatan waktu informasi tersebut. Bagi suatu organisasi komunikasi merupakan suatu proses yang sangat penting karena komunikasi

diperlukan untuk tercapainya efektivitas kepemimpinan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, pelatihan, pembuatan keputusan dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa model pendekatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, perumusan efektivitas dengan model tujuan rasional dengan Lubis dan Huseini kategori manajemen ilmiah, perumusan tujuan organisasi, perencanaan, evaluasi, produktivitas dan efisiensi, model hubungan manusia dengan kategori moral dan pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan konflik dalam organisasi, model sistem terbuka dengan kategori populasi organisasi, analisis jumlah anggota organisasi, lingkungan kerja dan strategi pengendalian lingkungan organisasi. Dan yang terakhir yaitu model proses internal dengan kategori komunikasi, pengelolaan informasi, efektivitas komunikasi dan pembuatan keputusan.

2.1.5. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, Teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau Teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sjafrizal (2014:24).

Definisi Perencanaan Pembangunan menurut Sirojuzilam dan Mahali (2010) dalam Strategi Pembangunan Daerah (2015) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud:

- a. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas
- b. Meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas
- c. Mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Pengertian perencanaan pembangunan menurut Srthut W. Lewis dalam perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Selanjutnya, Randy R dan Rian Nugroho (2006) dalam strategi pembangunan daerah (2015) menjelaskan bahwa factor yang menentukan perencanaan pembangunan diataranya dalah:

- a. Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu administrasi.
- b. Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan daerah atau perencanaan Kawasan.
- c. Pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan bidang keamanan.
- d. Pemahaman tentang subtansi dan ukuran perencanaan yaitu mengandung visi nasional, mengandung misi departemen, mengandung misi daerah secara komprehensif, atau mengandung misi daerah secara sectoral.

- e. Pemahaman tentang sumber/ bentuk pembiayaan perencanaan, yaitu bersumber dari negara – pusat, bersumber dari negara – daerah, bersumber dari swasta, bersumber dari asing (uang atau hibah).
- f. Pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga swasta, masyarakat terorganisasi, atau masyarakat umum.
- g. Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, yaitu pembangunan, program, proyek, atau *crash program*.
- h. Pemahaman tentang rencana pelaksanaan/ implementasi perencanaan pembangunan, yaitu oleh departemen, oleh dinas provinsi, oleh dinas kabupaten/kota.
- i. Pemahaman tentang instrument perencanaan: dokumen kampanye presiden, dokumen pembangunan jangka menengah nasional, dokumen pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis departemen, rencana strategis daerah, rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja lembaga, atau rencana lembaga daerah untuk 1 tahun.
- j. Pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis DPR, presiden, perwakilan kelompok negara/ Lembaga, donor, Menteri, DPRD, gubernur, kepala dinas provinsi, DPRD kabupaten/ kota, bupati/walikota, kepala kantor bupati/ walikota.
- k. Pemahaman tentang alur perencanaan : *top-down*, *bottom-up*, sinergi *top-down dan bottom up*

2.1.6. Konsep *E-Government*

2.1.6.1. Pengertian *E-Government*

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi di lingkungan pemerintah. Pada umumnya digunakan untuk administrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan *E-Government*. *E-Government* dapat digolongkan dalam empat tingkatan yaitu tingkatan pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui *website*. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah melalui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi diseluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian *database* bersama (Ahmad dkk, 2013).

2.1.6.2. Konsep dan Prinsip *E-Government*

Konsep *e-Government* berkembang karena adanya 3 (tiga) pemicu (*drivers*) utama yaitu:

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat berbagai isu-isu yang dapat menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia.

2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan taramat sangat cepat. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa perantara apapun. Tentu saja teknologi ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnya.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Dengan adanya ketiga aspek di atas dapat dijadikan sebagai penyebab terjadinya tekanan yang berasal dari masyarakat terhadap pemerintah agar mampu memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada.

2.1.6.3. Manfaat *E-Government*

Al-Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:5) menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya *e-government*:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya*, (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan dan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan sehari-hari;
4. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global; dan
5. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Berdasarkan pernyataan tentang konsep *e-government*, *e-government* yaitu pemanfaatan teknologi dibidang pemerintahan yang bertujuan mempermudah pemerintah dalam melayani masyarakat. Dewasa ini perkembangan teknologi diharapkan membantu segala proses pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui *e-government*, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor pemerintahan.

2.1.7. Konsep Partisipasi

Partisipasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang artinya "mengambil bagian keikutsertaan". Pengertian partisipasi masyarakat secara umum dalam pembangunan menurut Wirawan (2015) merupakan: Keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan,

manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Menurut Conyers (1994) sebagaimana dikutip oleh Wirawan (2015), partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan dikarenakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat menjadi informan terkait kebutuhan, kondisi serta bagaimana sikap dari masyarakat itu sendiri,
- b. Dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program kegiatan pembangunan; dan
- c. Mendorong partisipasi umum.

Tingkat partisipasi akan mampu melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat didalam proses pembangunan. Arnstein sebagaimana dikutip oleh Wirawan (2015) memaparkan partisipasi kedalam tiga derajat yaitu: non partisipatif, tokenisme (semu), dan kekuasaan masyarakat, untuk kemudian diperinci dalam delapan tangga (tingkat) partisipasi masyarakat, dimana setiap tingkatan berkaitan dengan perluasan kekuasaan masyarakat untuk menentukan produk akhir sebagaimana di Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Delapan Tingkat Partisipasi

No	Tangga	Derajat	Penjelasan	Indikator
1	Manipulasi	Non Partisipasi	Relatif tidak terjalin komunikasi Pemerintah-masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang hanya sebatas di informasikan saja
2	Terapi		Inisiatif komunikasi sangat terbatas, datang hanya dari pemerintah (satu arah)	Undangan pelaksanaan Musrenbang
3	Menyampaikan Informasi	Tokenisme (semu)	Sudah tidak terbatas lagi komunikasi antara pemerintah-masyarakat tetapi masih bersigat satu arah	Sosialisasi jadwal musrenbang

4	Konsultasi		Komunikasi pemerintah-masyarakat bersifat dua arah	Masyarakat bisa usul secara langsung
5	Peredam Kemarahan		Tidak hanya ada komunikasi pemerintah-masyarakat tetapi juga disertai negosiasi	Usulan masyarakat dibahas dalam forum formal musrenbang
6	Kemitraan		Terdapat komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam posisi yang sejajar	masyarakat bisa turut serta mengawasi pembangunan
7	Pendelegasian		Pemerintah memberi kewenangan kepada masyarakat mengurus kebutuhan serta kepentingannya sendiri terkait pelayanan publik	Kepercayaan dari pemda kepada masyarakat dalam merencanakan pembangunan
8	Pengawasan Masyarakat	Kekuasaan Masyarakat	Masyarakat bisa ikut terlibat dalam perumusan, implementasi, evaluasi dan control kebijakan publik secara aktif	Tersedia sarana untuk masyarakat dapat mengawasi kebijakan

Sumber: Arnstein (1969)

2.1.8. Sistem *E-Planning*

Secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Istilah “sistem” sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata “sistem” mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Sedangkan *E-planning* atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dala

penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No.86 Tahun 2017.

Menurut Silva, *e-planning* adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi virtual reality) dari sistem perencanaan berbasis kertas/ manual sebagai sistem perencanaan konvensional.

E-Planning juga diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-Planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga secara umum tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi dalam sistem *on-line* dan *off-line*. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan profesional;

3. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah;
4. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah” hal ini menjadi perencanaan logistik untuk pengembangan Sistem Informasi dalam ranah Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan memanfaatkannya secara optimal, sistem informasi diharapkan dapat memudahkan representasi data-data pada sistem informasi yang dikembangkan terutama untuk pengembangan sistem informasi di lembaga pemerintahan dalam oeningkatan *e-government*. Tata pemerintahan yang baik (*e-government*) adalah proses yang terpisah diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negara untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini tidak menjamin penyelesaian segala sesuatu yang akan menjadi sempurna namun dipatuhi yang jelas dapat membantu mengatasi kesulitan dan korupsi. Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat disetujui dengan memberlakukan kebebasan politik yaitu: 1) Partisipasi aktif; 2) Tegaknya hukum; 3) Transparansi; 4) Responsif; 5) Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat; 6) Keanggotaan dan pengaturan yang sama untuk semua orang; 7) Efektif dan ekonomis; 8) Dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.8.1. *Electronic planning* Kabupaten Meranti

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi stakeholder. *E-Planning* ini menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga secara umum tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam sistem online dan offline. Terciptanya interaksi dari sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
3. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan daerah.
4. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
6. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

Dalam sistem aplikasi *e-planning* terdapat 4 modul, diantaranya sebagai berikut :

1. Satuan Harga, yaitu aplikasi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standard Biaya (ASB);
2. *E-Musrenbang*, yaitu aplikasi pelaksanaan rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD sampai dengan Penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) OPD;
3. *E-Pokir*, yaitu aplikasi pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Perencanaan Berkelanjutan, yaitu aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Renstra dan Renja-OPD.

2.2. Kerangka Pemikiran

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah selain untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat juga bermanfaat untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan dokumen pemerintah daerah lainnya.

Kerangka pemikiran adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya tentang hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiono, 2008;60).

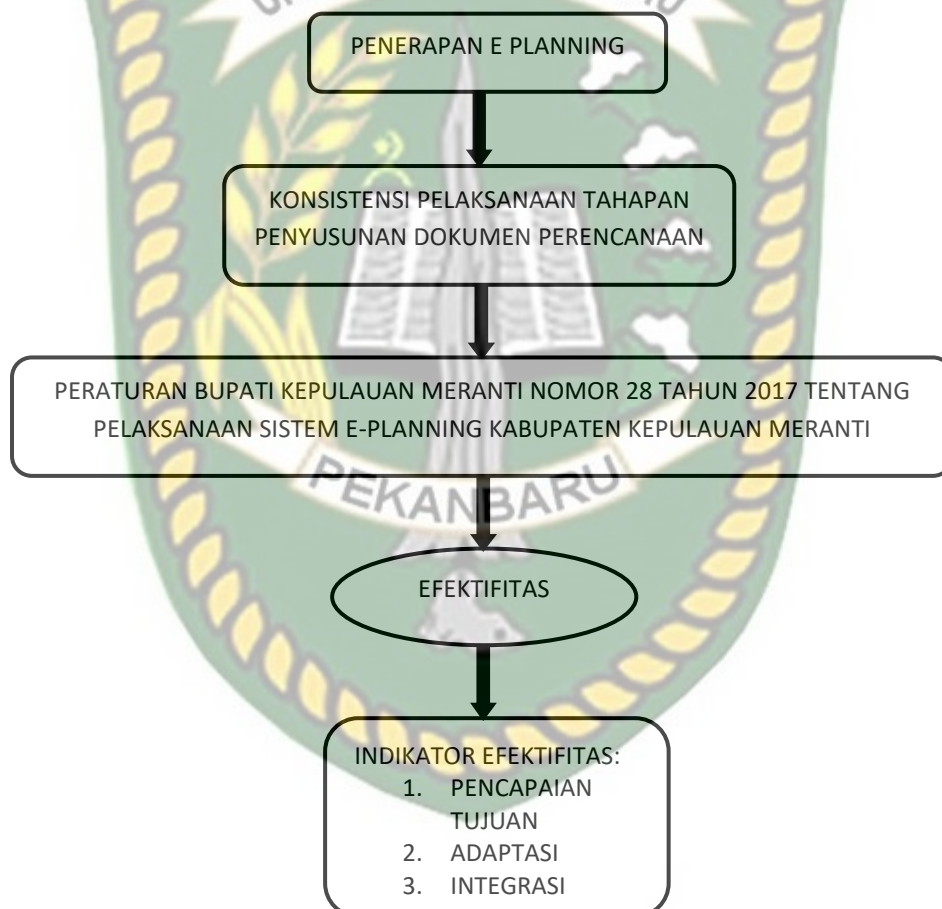
Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah konsistensi antar dokumen merupakan sebuah kewajiban, untuk itu berbagai upaya dilakukan agar kewajiban konsistensi pelaksanaan antar tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni dengan menerapkan penyusunan Dokumen Perencanaan menggunakan teknologi informasi sesuai amanat Permendari Nomor 70 Tahun 2019 yaitu menggunakan sistem *e-planning*, dengan harapan konsistensi pelaksanaan tahapan perencanaan sesuai agenda kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Dalam melakukan pra penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara dengan informan terkait dengan penelitian, yakni penerapan system *e-planning*. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan Duncan, karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan. Menurut Duncan, ada 3 (tiga) ukuran yang mempengaruhi efektifitas penerapan system E-Planning, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Adaptasi

3. Integrasi

Kesesuaian terkait teori Duncan dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses penerapan system E-Planning dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu penulis menggunakan kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



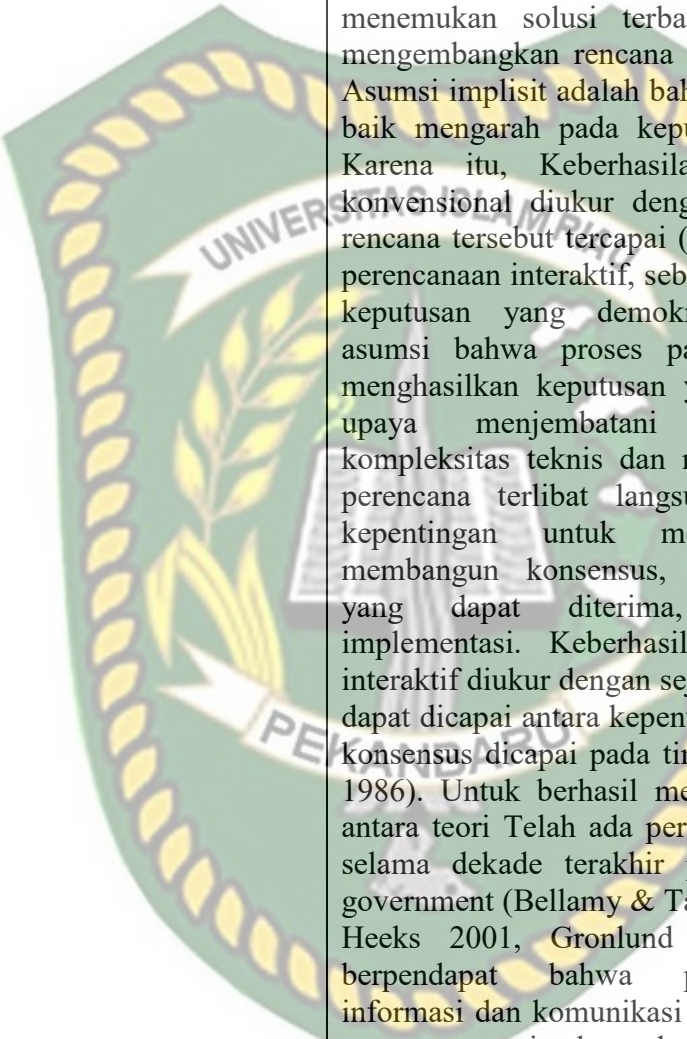
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Author	Findings
1.	Aikins, Stephen Kwamena (2010)	Bab ini membahas tentang pentingnya memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan teori dan praktik perencanaan partisipatif. Partisipasi warga dalam perencanaan kota dan proses pembangunan merupakan latihan penting yang memperkaya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan daerah. Kemajuan dalam teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Sistem Pendukung Perencanaan (PSS) telah memberikan kesempatan bagi badan perencanaan untuk mengadopsi dan memfasilitasi perencanaan elektronik partisipatif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Terlepas dari peluang ini, penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah hambatan untuk adopsi teknologi ini secara luas. Menggambar pada perspektif teoritis perencanaan, literatur tentang perencanaan partisipatif dan e-planning, serta ulasan dari beberapa teknologi yang ada untuk mendukung praktik perencanaan partisipatif, Bab ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem perencanaan elektronik partisipatif yang dirancang dengan baik dapat menjadi pemungkin untuk pengambilan keputusan kolaboratif dan membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang mengelilingi banyak proyek pembangunan perkotaan, fitur musyawarah dari sistem perencanaan elektronik yang lebih baru harus ditingkatkan untuk bergerak melampaui umpan balik umum yang terdokumentasi, memanfaatkan spasialitas lingkungan partisipatif, dan memungkinkan konsultasi dinamis yang lebih real-time, jika mereka ingin menjadi alat partisipatif yang efektif. Partisipasi warga adalah proses yang memberikan kesempatan kepada individu swasta untuk mempengaruhi keputusan publik dan telah lama menjadi komponen dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Akar partisipasi warga dapat ditelusuri ke Yunani kuno dan Inggris Baru Kolonial. Cara terbaik untuk melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah telah menjadi perhatian sejak

	 pembentukan bangsa. Sarjana perkotaan menyarankan bahwa pemerintah daerah memiliki kesempatan terbaik untuk mempromosikan interaksi tatap muka antara pejabat terpilih dan masyarakat (Saltzstein 2003). Berdasarkan hal tersebut, terdapat tradisi yang kuat untuk mendorong keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik lokal. Cogan, Sharpe & Hertzberg (1986 :284) mengidentifikasi lima manfaat partisipasi warga dalam proses perencanaan. Ini adalah informasi dan gagasan tentang masalah publik; dukungan publik untuk keputusan perencanaan; menghindari konflik yang berlarut-larut dan penundaan yang mahal; reservoir niat baik yang dapat dibawa ke keputusan masa depan; dan semangat kerjasama dan kepercayaan antara lembaga dan publik. Sebelum tahun 1960-an, proses pemerintah jarang menjadi satu-satunya penentu, dan bahwa pendekatan teknis untuk pengambilan keputusan sulit diterapkan dengan sukses pada masalah sosial karena tujuan sosial seringkali kompleks, bertentangan dan tidak jelas (DeSario & Langton 1987). Ini menyiratkan pengambilan keputusan yang demokratis, yang mencerminkan rasionalitas komunikatif dan memiliki perpaduan yang baik antara komponen teknis dan nilai, dapat bermanfaat dalam mengatasi masalah sosial melalui kolaborasi dan pembangunan konsensus untuk membantu meningkatkan penerimaan keputusan kompleks yang berkaitan dengan masalah sosial. Pengambilan keputusan yang demokratis, berbeda dengan pengambilan keputusan birokrasi atau teknis, didasarkan pada asumsi bahwa semua yang terpengaruh oleh suatu keputusan berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Partisipasi bisa langsung dalam pengertian demokrasi klasik, atau dapat melalui perwakilan untuk sudut pandang mereka dalam model pluralis-republik (Kweit & Kweit 1986, 22). Di Amerika Serikat, keterlibatan masyarakat mendukung pendekatan perencanaan yang lebih interaktif. Dia menyarankan perencanaan konvensional cenderung didominasi oleh gaya teknis / analitik di mana perencana adalah ahli yang bebas nilai netral yang menasihati pembuat keputusan tentang cara terbaik
--	---

	 untuk mencapai tujuan mereka dan melayani kepentingan publik. Ini menyiratkan sebagai pendekatan berbasis rasionalitas instrumental untuk perencanaan, penekanannya adalah pada pengumpulan dan analisis data sebagai cara untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah dan mengembangkan rencana yang secara teknis baik. Asumsi implisit adalah bahwa informasi yang lebih baik mengarah pada keputusan yang lebih baik. Karena itu, Keberhasilan dalam perencanaan konvensional diukur dengan sejauh mana tujuan rencana tersebut tercapai (Lang 1986). Sebaliknya, perencanaan interaktif, sebagai bentuk pengambilan keputusan yang demokratis, didasarkan pada asumsi bahwa proses partisipatif yang terbuka menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dalam upaya menjembatani kesenjangan antara kompleksitas teknis dan nilai-nilai berbasis teori, perencana terlibat langsung dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan, membangun konsensus, mengidentifikasi solusi yang dapat diterima, dan mengamankan implementasi. Keberhasilan dalam perencanaan interaktif diukur dengan sejauh mana keseimbangan dapat dicapai antara kepentingan yang bersaing dan konsensus dicapai pada tindakan yang tepat (Lang 1986). Untuk berhasil menjembatani kesenjangan antara teori Telah ada perhatian yang berkembang selama dekade terakhir pada konseptualisasi e-government (Bellamy & Taylor 1998, Garson 1999, Heeks 2001, Gronlund 2002). Beberapa ahli berpendapat bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendemokratisasi proses pemerintahan dapat dikonseptualisasikan atas dasar gagasan bahwa warga negara harus dapat mengakses informasi, mempertimbangkan dan mendiskusikan masalah politik, dan untuk memilih secara elektronik atau menggunakan pengaruh tidak langsung yang efektif pada pengambilan keputusan (Gross 2002, Barber 1984). Ketersediaan dan aksesibilitas informasi semacam itu dapat membantu mengurangi asimetri informasi yang mengganggu proses partisipasi dan memastikan peserta warga negara yang terinformasi dalam proses kebijakan, termasuk perencanaan partisipatif.
--	---

2	Anthopoulos, Leo G .; Siozos, Panagiotis; Tsoukalas, Ioannis A. (2007)	Rencana strategis E-Government bersifat politis, diarahkan pada minimalisasi biaya dan waktu selama pelaksanaan layanan publik, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan warga negara atau prosedur operasi administrasi publik. Meskipun rencana ini telah mengarah pada pengembangan proyek yang berhasil menghemat biaya dan waktu bagi warga dan administrasi publik, survei yang dilakukan di seluruh dunia menunjukkan bahwa pengguna mengevaluasi layanan publik digital dan tidak ragu untuk kembali ke metode tradisional daripada menggunakan digital. saluran untuk bertransaksi dengan administrasi publik lagi; mereka juga tidak akan merekomendasikan penggunaan layanan digital kepada orang lain. Artikel ini menyajikan alat dan metode kolaboratif dan partisipatif yang dirancang untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai negeri dalam peningkatan dan pelaksanaan layanan publik adat dan non-otomatis. Alat kolaborasi dapat berhasil dalam pengembangan toko serba ada yang nyata untuk e-Government, sementara di sisi lain mereka dapat mendorong warga dan pegawai negeri untuk berpartisipasi dalam era e-Government. © 2006 Elsevier Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Pengembangan E-Government saat ini didasarkan pada rencana strategis yang dirancang di bawah tanggung jawab pemerintah dan yang semuanya menetapkan target serupa untuk modernisasi administrasi publik: minimalisasi biaya dan waktu selama pelaksanaan layanan publik dan pengembangan administrasi publik yang lebih baik dan berpusat pada warga negara. Secara umum, pengembangan rencana strategis e-Government adalah prosedur “top-down”, Empat rencana strategis utama diselidiki agar metode pengembangan e-Government dari atas ke bawah dianalisis. Tujuan investigasi adalah (a) identifikasi prosedur yang diikuti sebelum dan selama implementasi e-Government, (b) penemuan target yang ditetapkan untuk e-Government di berbagai negara / wilayah, (c) platform dan aplikasi TIK yang dihasilkan dikembangkan berdasarkan rencana tersebut, dan (d) hasil saat ini dan prospek
---	---	--

		pencapaiannya. Rencana strategis yang diselidiki adalah rencana aksi e-Government Pemerintah Federal AS (FEA Working Group, 2002; Dewan Petugas Informasi Kepala Federal AS, 2004) (Pemerintah Federal AS, 2002), rencana Modernisasi Pemerintah Inggris (Kantor Kabinet Inggris, Kantor -Envoy, 2002; Kantor Kabinet Inggris, 2000), Rencana Aksi eEurope 2005 Komite Eropa (Komisi Eropa, 2002), dan BundOnline 2005 Pemerintah Federal Jerman (Pemerintah Federal Jerman, 2003).
3	Axelsson, Karin; Melin, Ulf; Lindgren, Ida (2010)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah, dan dalam hal ini, bagaimana dan apa bidang e-government dapat belajar dari konsep dan teori partisipasi pengguna dalam penelitian sistem informasi umum (IS). Ini bertujuan untuk berkontribusi dengan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi dan keterlibatan warga dalam badan pengetahuan penelitian e-government dan ketika mengembangkan layanan elektronik publik dalam praktik. Desain / metodologi / pendekatan - Analisis dalam makalah ini dibuat dari studi kasus kualitatif komparatif dari dua proyek e-government. Tiga tema analisis diinduksi dari tinjauan pustaka; praktek partisipasi, insentif untuk partisipasi, dan organisasi partisipasi. Tema-tema ini memandu analisis komparatif data kami dengan keterbukaan bersamaan terhadap interpretasi dari lapangan. Temuan - Hasil utama dalam makalah ini adalah bahwa bidang e-government dapat memperoleh inspirasi dan belajar dari metode dan pendekatan dalam proyek IS tradisional mengenai partisipasi pengguna, tetapi dalam e-government, metode juga diperlukan untuk menangani tantangan yang muncul saat merancang layanan elektronik publik untuk kelompok pengguna yang besar dan heterogen. Keterlibatan warga tidak dapat dilihat sebagai tantangan terpisah dalam e-government, melainkan sebagai bagian terintegrasi dari proses pengorganisasian, pengelolaan, dan pelaksanaan proyek e-government.
4	Axelsson, Karin; Melin, Ulf; Lindgren, Ida (2010) (2)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah, dan dalam hal ini, bagaimana dan apa bidang e-government dapat belajar dari konsep dan teori partisipasi pengguna dalam penelitian sistem

		informasi umum (IS). Ini bertujuan untuk berkontribusi dengan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi dan keterlibatan warga dalam badan pengetahuan penelitian e-government dan ketika mengembangkan layanan elektronik publik dalam praktik. Desain / metodologi / pendekatan - Analisis dalam makalah ini dibuat dari studi kasus kualitatif komparatif dari dua proyek e-government. Tiga tema analisis diinduksi dari tinjauan pustaka; praktek partisipasi, insentif untuk partisipasi, dan organisasi partisipasi. Tema-tema ini memandu analisis komparatif data kami dengan keterbukaan bersamaan terhadap interpretasi dari lapangan. Temuan - Hasil utama dalam makalah ini adalah bahwa bidang e-government dapat memperoleh inspirasi dan belajar dari metode dan pendekatan dalam proyek IS tradisional mengenai partisipasi pengguna, tetapi dalam e-government, metode juga diperlukan untuk menangani tantangan yang muncul saat merancang layanan elektronik publik untuk kelompok pengguna yang besar dan heterogen. Keterlibatan warga tidak dapat dilihat sebagai tantangan terpisah dalam e-government, melainkan sebagai bagian terintegrasi dari proses pengorganisasian, pengelolaan, dan pelaksanaan proyek e-government. Analisis tema partisipasi yang dihasilkan dari literatur; praktik, insentif, dan organisasi dapat digunakan untuk menyoroti, menganalisis, dan mendiskusikan masalah utama terkait tantangan partisipasi warga dalam e-government. Ini adalah implikasi penting berdasarkan makalah ini yang memberikan kontribusi baik untuk teori dan praktik e-government. Implikasi praktis - Pelajaran untuk dipelajari dari makalah ini menyangkut bahwa banyak proyek e-government memiliki layanan elektronik publik sebagai salah satu hasil dan sistem e-administrasi internal sebagai hasil lainnya. Perspektif badan internal yang mendominasi dalam proyek-proyek semacam itu mungkin menyiratkan bahwa warga negara sebagai kelompok pengguna layanan elektronik hanya dilihat sebagai penerima pasif dari hasil - bukan sebagai peserta aktif dalam pengembangan.
5	Bonacin, Rodrigo; Melo,	Sifat multidisiplin dari e-government menuntut

	Amanda M .; Simoni, Carlos AC; Baranauskas, M. Cecilia C. (2010)	agenda penelitian yang mencakup masalah yang terkait dengan inklusi sosial, aksesibilitas universal, interoperabilitas, privasi, keamanan, dan partisipasi warga, untuk beberapa nama. Memahami konteks budaya yang mendasari, keterlibatan warga dalam pengusulan dan evaluasi layanan, serta peningkatan kualitas dalam penggunaan merupakan aspek yang memerlukan pertimbangan khusus dalam pengembangan sistem untuk mendukung pemerintah. Makalah ini memberikan garis besar untuk model proses untuk mempromosikan identifikasi dan spesifikasi layanan e-government yang dapat diakses dengan partisipasi pihak yang berkepentingan. Perspektif bersama secara sosial diadopsi untuk memahami masalah yang terlibat dan penjabaran solusi potensial. Model yang diusulkan adalah hasil dari praktek di domain, menggunakan artefak semiotika organisasi untuk merangsang partisipasi dan diskusi. 51. Oostveen, AM, Besselaar, P .: Dari skala kecil hingga partisipasi pengguna skala besar: studi kasus desain partisipatif dalam sistem e-government.
6	Chen, Jie (2009)	Tren e-government saat ini telah berubah dari penyediaan layanan menjadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai layanan. Namun, terlepas dari pentingnya evaluasi layanan e-government, literatur menunjukkan bahwa evaluasi e-government masih merupakan bidang yang belum matang dalam hal pengembangan dan pengelolaan. Dalam makalah ini, dua metode untuk mengevaluasi kualitas layanan yang ditawarkan oleh e-government akan dibahas. Indeks partisipasi elektronik warga mengevaluasi pencapaian target. Sedangkan model BSC yang dimodifikasi sebagai manajemen proses untuk mengontrol pemberian layanan yang memenuhi syarat. Mengadopsi kedua metode bersama-sama dapat menilai kinerja e-government yang berbeda dari pendekatan evaluasi yang diadopsi metode tunggal lainnya. 'warga negara dan pemerintah'. Ini termasuk opsi untuk membayar pajak, mengajukan permohonan untuk KTP, akta kelahiran, paspor dan perpanjangan izin, serta interaksi G ke C serupa lainnya, dan memungkinkan warga negara untuk mengakses layanan ini secara online. Semua transaksi

		dilakukan secara online. Tahap 5 Terhubung: Pemerintah mengubah diri mereka sendiri. E-government berkembang dari tahap awal akses informasi pasif ke partisipasi yang lebih aktif yang berpusat pada warga negara dan berorientasi nilai layanan untuk mempromosikan edemokrasi. Untuk indeks partisipasi dan model BSC yang dimodifikasi akan menilai nilai layanan e-government dengan lebih baik. Pemerintah mengubah diri mereka sendiri e-government berkembang dari tahap awal akses informasi pasif ke partisipasi yang lebih aktif yang berpusat pada warga negara dan berorientasi nilai layanan untuk mempromosikan edemokrasi.
7	Ertiö, Titiana (2013)	Unit analisis dalam penelitian ini adalah aplikasi. Saya menyelidiki hampir 100 aplikasi tata kelola perkotaan, 35 di antaranya dianalisis secara mendalam. Awalnya, studi tersebut seharusnya hanya berfokus pada aplikasi perencanaan kota. Namun, jumlah aplikasi perencanaan kota yang sebenarnya terbukti masih kecil, sementara banyak aplikasi terkait secara luas dengan aspek perencanaan tata kelola kota. Sampel mewakili status aplikasi perencanaan partisipatif saat ini. Data pada aplikasi ini dikumpulkan menggunakan portal web, sumber media sosial, dan daftar distribusi, serta melalui kolega. Aplikasi dipilih berdasarkan kriteria berikut. a) Relevansi untuk perencanaan kota: khususnya, aplikasi yang berhubungan dengan rencana induk, zonasi, rencana strategis dan pembangunan, dan sebagainya. Namun, dalam sampel saya, banyak aplikasi yang berhubungan dengan infrastruktur perkotaan, seperti transportasi atau utilitas, dan bisa disebut sebagai aplikasi tata kelola kota yang berhubungan dengan perencanaan daripada aplikasi perencanaan. b) Distribusi geografis: contoh mencakup berbagai wilayah di seluruh dunia, dari Amerika Serikat hingga Hong Kong, dan dari Australia hingga Finlandia. c) Berbagai peran warga: warga negara dapat mengambil informasi, menghasilkan konten, dan bahkan berinteraksi dengan "objek pintar", yang mengacu pada informasi tertanam yang dapat diambil oleh pengguna. d) Ekosistem partisipasi: aplikasi menghadirkan peluang untuk kolaborasi antara warga negara, pemerintah daerah, dan

		lembaga lain, lembaga penelitian, dan organisasi akar rumput. e) Transferabilitas: potensi aplikasi lokal untuk ditingkatkan. Tipologi aplikasi Untuk membahas bagaimana aplikasi yang ada memfasilitasi partisipasi warga dalam perencanaan kota, saya telah memplot aplikasi dalam tipologi menggunakan dimensi tujuan, arus informasi, dan leverage. Dimensi-dimensi ini didasarkan pada teori partisipasi warga. Hasilnya adalah delapan jenis aplikasi perencanaan partisipatif, yang mewakili kombinasi atribut yang berbeda.
8	Hartog, Martijn; Bakker, Kevin (2018)	Warga digital dalam masyarakat partisipatif mendorong kebutuhan partisipasi warga dan meningkatkan keterlibatan dalam proses publik dari administrasi publik. Selain itu, amandemen legislatif oleh Undang-Undang Pemerintahan Terbuka yang baru menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari pengeluaran dan penganggaran publik. Inisiatif, memfasilitasi penganggaran partisipatif bervariasi dari percobaan dalam memantau aliran anggaran hingga mengalokasikan anggaran. Makalah ini merefleksikan hambatan dan peluang penganggaran partisipatif di enam kota percontohan di Belanda. Ini menggambarkan perbedaan dan ketidaksesuaian pada tingkat lingkungan, kabupaten dan kota aliran anggaran dan proses administrasi untuk sepenuhnya menggunakan potensi transparansi. Penganggaran partisipatif dapat dilihat sebagai proses terorganisir di mana warga suatu daerah bersama-sama menentukan topik dan masalah mana yang dianggap penting untuk investasi publik (Sintomer et al., 2012; Hofman, 2017). Negosiasi tentang anggaran warga negara sebagian besar difokuskan pada proses pengambilan keputusan (Bank Dunia, 2007; Tantangan Demokratis, 2017).
9	Holgersson, Jesper; Söderström, Eva; Karlsson, Fredrik; Hedström, Karin (2010)	Teknologi baru berarti cara baru untuk mengembangkan, menyediakan, dan mengonsumsi layanan. Dalam upaya organisasi pemerintah untuk membangun dan memelihara hubungan dengan warganya, kehadiran elektronik sangat penting. Layanan adalah salah satu cara untuk pergi, dan telah dikatakan bahwa partisipasi pengguna adalah bagian penting dalam mengembangkan layanan tersebut. Dalam makalah ini, kami menganalisis pilihan pendekatan partisipasi pengguna dari

		perspektif tujuan untuk melihat kesesuaiannya dalam konteks pengembangan layanan e-government., Dengan demikian, kami mengidentifikasi empat tantangan yang perlu ditangani saat menyertakan pengguna dalam pembangunan: 1) Mengidentifikasi segmen sasaran pengguna, 2) Mengidentifikasi pengguna individu dalam setiap segmen, 3) Mendorong pengguna untuk berpartisipasi, dan 4) Kurang memiliki keterampilan yang memadai. pola. Langkah pertama berkaitan dengan perolehan persyaratan pengembangan layanan e-government. Langkah ini didasarkan pada penelitian yang ada pada layanan e-government dan disajikan di Bagian 2. Langkah kedua, yang disajikan di Bagian 4, terdiri dari rekonstruksi tujuan desain di balik setiap pendekatan partisipasi pengguna yang dipilih.
10	Mishra, H .; Hiremath, BN (2006)	E-governance disebut sebagai bentuk pemerintahan yang terdiri dari proses dan struktur dalam penyampaian layanan elektronik kepada warga (Jansen, 2005). Dengan kata lain, e-governance menggunakan TIK untuk mendukung pembuat kebijakan, pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Ia juga mendukung e-demokrasi, di mana semua interaksi antara pemilih dan terpilih dilakukan secara elektronik (Bhatnagar, 2000a; Prabhu, 2004). E-Governance pada dasarnya adalah versi transformasi dari "tata kelola" melalui intervensi TIK. Oleh karena itu, diharapkan penerapan TIK perlu menjaga kesucian tata kelola baik isi maupun jiwa. Sistem e-government perlu mendukung sistem e-governance yang berfokus pada warga negara. Kedua sistem ini perlu berkolaborasi untuk penyampaian layanan yang efektif melalui proses yang direkayasa ulang. Sistem e-government mempertimbangkan berbagai proses rekayasa ulang untuk memenuhi harapan warga sedangkan sistem e-governance memberikan suasana untuk melibatkan warga negara untuk menguraikan layanan yang diharapkan. Singkatnya, sistem e-government adalah bagian dari sistem e-governance. Ada berbagai model dan kerangka kerja e-governance dan e-government yang dikembangkan untuk memahami kompleksitas masalah, untuk menghargai bidang intervensi TIK

		dan untuk memperjelas hasil melalui proses yang mendukung TIK (Bhatnagar, 2004b; Satyanararyana, 2004). E-governance dicirikan sebagai mekanisme di mana semua pemangku kepentingan diharapkan untuk berpartisipasi dan mengumpulkan layanan secara kolaboratif. Mitra ini berbentuk “penyedia layanan” seperti pemerintah, LSM, dan organisasi berbasis masyarakat (CBO), dll. Ada berbagai model dan kerangka kerja e-governance dan e-government yang dikembangkan untuk memahami kompleksitas masalah, untuk menghargai bidang intervensi TIK dan untuk memperjelas hasil melalui proses yang mendukung TIK (Bhatnagar, 2004b; Satyanararyana, 2004). E-governance dicirikan sebagai mekanisme di mana semua pemangku kepentingan diharapkan untuk berpartisipasi dan mengumpulkan layanan secara kolaboratif.
11	Oostveen, Anne Marie; Van Den Besselaar, Peter (2004)	Sebagian besar eksperimen dengan desain partisipatif berskala kecil, berdiri sendiri dan tidak terlalu strategis dalam penerapan TIK dalam organisasi. Namun, aplikasi TIK modern semakin didasarkan pada teknologi jaringan yang kompleks dan berskala besar. Masalah PD apa yang muncul dalam jenis proyek ini? Metode apa yang dapat digunakan untuk partisipasi pengguna? Dan, apa implikasinya bagi strategi PD? Sistem E-government Anne-Marie Oostveen & Departemen Ilmu Sosial Peter van den Besselaar, NIWI-KNAW, - Pengguna akhir sebagai warga negara dengan opini politik tentang mobilitas, migrasi, kerjasama internasional, dan tentang teknologi, keamanan, privasi, dan kepercayaan pada e- sistem pemerintahan. layanan, relevan untuk desain sistem e-government.
12	Poorazizi, M. Ebrahim; Steiniger, Stefan; Hunter, Andrew JS (2015)	Arsitektur berorientasi layanan untuk memungkinkan perencanaan partisipatif: Kemajuan terbaru dalam teknologi Web telah membuka jalan untuk menciptakan platform sosio-teknis yang dapat memberdayakan warga dalam proses perencanaan kota. Munculnya GeoWeb dan popularitas alat kolaboratif Web 2.0 dapat memfasilitasi pengembangan generasi baru platform GIS Partisipatif Publik (PPGIS) dari bawah ke atas yang dapat memasukkan konten yang dibuat pengguna ke dalam Spatial Data

		Infrastructures (SDIs). Mekanisme penyampaian berbasis layanan yang baru dapat memberikan fleksibilitas arsitektural dan kemampuan beradaptasi, dan memungkinkan publik untuk mendapatkan keuntungan dari akses informasi di mana-mana. Dari perspektif e-partisipasi, fungsi jejaring sosial Web 2.0 mendukung komunikasi interaktif antara berbagai pemangku kepentingan PPGIS, misalnya, warga negara, perencana, dan pengambil keputusan. Kontribusi utama artikel ini adalah untuk menyajikan arsitektur referensi untuk platform perencanaan elektronik yang (1) memfasilitasi partisipasi elektronik yang efektif dengan memungkinkan komunikasi berbasis peta multi arah di antara berbagai pemangku kepentingan pengembangan lahan (misalnya, perencana, pengambil keputusan, warga, dll.), dan (2) memungkinkan penggabungan kemampuan visualisasi, evaluasi, dan diskusi untuk mendukung proses perencanaan masyarakat. Untuk mencapai ini, kami mengembangkan arsitektur berorientasi layanan (SOA) yang memanfaatkan prinsip-prinsip SDI dan teknologi Web 2.0. Arsitektur platform memungkinkan sumber data yang heterogen, fungsi dan alat analitik, dan kerangka kerja presentasi untuk dicolokkan ke dalam sistem yang koheren untuk menyediakan platform pendukung perencanaan dan keputusan. Kami menyajikan dua implementasi dunia nyata dari arsitektur yang diusulkan yang telah dikembangkan untuk mendukung keterlibatan komunitas di Kota Calgary, Kanada.
13	Voss, Angi; Roeder, Stefanie; Märker, Oliver (2003)	Sebagai reaksi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan teknologi, bentuk kerjasama baru diterapkan dalam proyek-proyek pembangunan perkotaan dan daerah. Kami berpendapat bahwa tren ini secara signifikan dapat diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui TIK lebih banyak orang dapat berpartisipasi dengan cara yang lebih fokus, terbuka, lebih adil dan lebih transparan. Informasi yang kompleks dapat dianalisis, prosesnya didokumentasikan, dapat direproduksi, dan dapat dibandingkan. Metode dan media dapat digabungkan dengan cara yang sangat fleksibel untuk merancang proses yang efisien dan efektif. Sejauh proyek disimpan dalam basis

		pengetahuan, alat manajemen pengetahuan dapat memanfaatkan pengalaman yang terkumpul untuk terus meningkatkan metodologi kerjasama dalam pembangunan spasial. Dengan diperkenalkannya TIK, Metode kerjasama yang ada dalam pemerintahan dan perencanaan tidak boleh begitu saja disalin ke media baru tanpa modifikasi lebih lanjut. Teknik elektronik (sinkron atau asinkron, terdistribusi atau tidak, audio-, video atau media berbasis teks) dapat digunakan untuk metode tradisional yang berbeda dalam fase proses yang berbeda, dan dapat digabungkan dengan cara yang benar-benar baru, yang mengarah ke metode dan alur kerja baru. Hanya jika potensi TIK ini diperhitungkan dengan merestrukturisasi proses itu sendiri, proses perencanaan kerja sama menghasilkan keputusan berkualitas tinggi yang diinformasikan dalam waktu yang lebih singkat. Pendekatan kami bertujuan untuk mengeksplorasi peluang yang ditawarkan oleh TIK baru untuk metode kerjasama baru dalam pemerintahan dan perencanaan - di luar perluasan metode tradisional ke media komunikasi elektronik.
14	Yousef AM Neyazi, Yousef AM Neyazi (2016)	Sejak dua dekade terakhir, sistem informasi diadopsi secara luas di semua aspek kehidupan. Di negara maju, sistem elektronik sekarang telah digunakan bersama oleh perusahaan dan organisasi pemerintah menggunakan database Bersama untuk mengelola urusan sipil untuk kota, kota atau dalam beberapa kasus untuk negara untuk proses pembangunan di seluruh dunia. Apalagi mereka telah diadopsi bahkan di negara berkembang seperti Arab Saudi di berbagai pemerintah daerah dan Al-Madinah adalah salah satunya. Sistem informasi ini tidak diterapkan hanya untuk masalah administrasi, tetapi lebih untuk tugas analitis dan perencanaan. Sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan kota disebut 'Sistem Informasi Perkotaan' khususnya Sistem Informasi Geografis "GIS". Makalah ini mengulas literatur sistem informasi perkotaan melalui tiga tingkatan: global, regional, dan lokal. Lalu bagaimana hal ini akan membutuhkan reformasi dari pemerintah daerah dan kotamadya untuk mendapatkan bentuk teknologi elektronik yang ada dan badan serta badan pemerintahan, individu, dan publik dalam

	mengintegrasikan upaya pembangunan kota. Lebih dari itu mengeksplorasi kasus proyek Al-Madinah e-government '. Terakhir, makalah ini menunjukkan bagaimana GIS dapat digunakan untuk perencanaan lokal untuk proyek-proyek di masa depan, perkiraan ukuran, dan pengaturan kebijakan. Proyek e-government di Al-Madinah adalah yang pertama di Saudi, dan akan diterapkan di seluruh kota lainnya. Sistem informasi perkotaan menjanjikan kapabilitas dan potensi besar untuk efisiensi perencanaan kota dalam hal: Partisipasi publik, penelitian elektronik untuk data perkotaan, dan mendukung pengambilan keputusan. dan publik dalam mengintegrasikan upaya dalam perkembangan kota. Lebih dari itu mengeksplorasi kasus proyek Al-Madinah e-government '. Terakhir, makalah ini menunjukkan bagaimana GIS dapat digunakan untuk perencanaan lokal untuk proyek-proyek di masa depan, perkiraan ukuran, dan pengaturan kebijakan. Proyek e-government di Al-Madinah adalah yang pertama di Saudi, dan akan diterapkan di seluruh kota lainnya. Sistem informasi perkotaan menjanjikan kapabilitas dan potensi besar untuk efisiensi perencanaan kota dalam hal: Partisipasi publik, penelitian elektronik untuk data perkotaan, dan mendukung pengambilan keputusan. dan publik dalam mengintegrasikan upaya dalam perkembangan kota.
--	---

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

2.4. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
2. Penerapan Teknologi Informasi pada penyusunan Dokumen Perencanaan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu menjalankan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor omor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem *E-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Sistem *E-Planning* adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Suatu Proses Penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social untuk jangka waktu tertentu.
5. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam hal penerapan suatu kebijakan. Dalam hal penerapan sistem *e-planning* setidaknya perlu SDM yang pakar dalam bidang teknologi informasi, selain itu juga dibutuhkan sarana dan prasara serta biaya operasional dalam menjalankannya.
6. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Dalam hal penggunaan sistem E-planning dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan, produk yang dihasilkan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang diharapkan berkualitas dan tersusun sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
7. Efisiensi yang diharapkan dalam penerapan sistem e-planning pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bentuk upaya penghematan waktu dan dimensi tenaga dalam proses perencanaan pembangunan

8. Kepuasan kepuasan yang terdiri dari dimensi penerimaan sikap pegawai dan dimensi keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai terkait penerapan e-planning di Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Keadaptasian merupakan proses percepatan penyesuaian dalam menggunakan sistem *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten kepulauan meranti.
10. Kelangsungan Hidup dalam hal ini adalah upaya mempertanggungjawaban untuk mengembangkan sistem e-planning sebagai program yang mampu mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkelanjutan,

2.5. Operasionalisasi Variabel

Tabel 2.3 Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Efektifitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan	Penerapan Teknologi Informasi (Sistem E-Planning) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian Tujuan	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu b. Biaya Operasional Lebih Hemat c. Transparansi
		Adaptasi	a. Kemampuan Organisasi dan Aparatur untuk menyesuaikan diri b. Kemampuan Aparatur untuk menggunakan system E-Planning

(Kumorotomo, 2005:362).		Integrasi	a. Mempermudah Komunikasi antar Perangkat Daerah b. Dapat mempermudah pimpinan dalam melakukan control c. Melakukan upaya pengembangan sistem E-Planning sesuai perkembangan yang terjadi
-------------------------	--	-----------	---

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

2.6. Teknik Pengukuran

Dalam melakukan pengukuran data, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi, Dalam Wirawan (2012:156) untuk memastikan data/informasi lengkap dan validitasnya dan reliabilitasnya tinggi, penelitian kualitatif mempergunakan teknik triangulasi (triangulation). Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian untuk menjaring data/informasi. Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif- sering juga dipakai dalam metode kuantitatif untuk mengukur validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan sintesis dan integrasi data dari berbagai sumber-sumber melalui pengumpulan, eksaminasi, perbandingan dan interpretasi. Triangulasi membantu untuk meniadakan ancaman bagi setiap validitas dan reabilitas data, triangulasi tidak hanya membandingkan data dari berbagai sumber data, akan tetapi juga mempergunakan berbagai teknik dan metode untuk meneliti dan menjaring data/informasi dari fenomena yang sama.

Dalam penelitian dapat dipergunakan lima jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi data adalah mempergunakan berbagai sumber data/informasi.
Dalam teknik triangulasi ini adalah mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber/data informasi.
2. Triangulasi peneliti. Teknik triangulasi ini digunakan oleh evaluator atau tim evaluator dalam satu proyek evaluasi. Para evaluator mempergunakan metode kualitatif yang sama misalnya wawancara, observasi, studi kasus, kelompok kunci atau informan kunci. Temuan dari setiap evaluator dibandingkan, jika temuan dari berbagai evaluator berbeda Satu dan lain maka diperlukan studi lebih lanjut untuk menentukan perbedaan tersebut. Apakah ada kemungkinan perbedaan tersebut dapat diperkecil?
3. Triangulasi teori. Triangulasi teori adalah penelitian dengan mempergunakan berbagai profesional dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan untuk menilai suatu set data/informasi.
4. Triangulasi metode. Triangulasi metode adalah pemakaian berbagai metode-metode kuantitatif dan atau metode kualitatif untuk mengevaluasi program. Jika kesimpulan dari setiap metode sama, maka validitas penelitian ditetapkan.
5. Triangulasi lingkungan. Triangulasi jenis ini mempergunakan berbagai lokasi yang berbeda, altar dan faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan lingkungan dimana penelitian mengambil tempat seperti waktu suatu hari, hari suatu minggu atau musim dalam satu tahun.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi data, triangulasi teori. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain sementara triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teori yang berkaitan guna mendapatkan data yang jelas.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe/ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moeleong (2005:6) adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandang dan pendukung agar focus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektifitas Penerapan Sistem E-Planning dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menerapkan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok melalui wawancara maupun angket pada informan terkait yaitu BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti dan Aparatur yang membidangi perencanaan di Perangkat Daerah. Telaah dokumen juga digunakan untuk

menambah data maupun dokumen pendukung lainnya yang kemudian dilakukan analisis dari sumber data yang diperoleh.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pemilihan lokasi penelitian ini dengan mempertimbangkan pelaksanaan penyelesaian pada masing-masing tahapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3 Populasi dan Sampel

Untuk menguji penelitian ini menggunakan Informan Penelitian. Informan penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti ini guna memperoleh informasi terkait dengan judul penelitian yang telah ditetapkan. Dalam informan penelitian akan dibahas mengenai teknik untuk menentukan informan dan siapa saja yang dapat menjadi informan dalam penelitian ini. Suyanto (2013:152) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan langsung informan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai Efektivitas Penerapan Electronic Planning dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dikabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Koordinasi/ Pengampu Perangkat Daerah dan Aparatur bagian Perencanaan pada setiap Perangkat Daerah.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi informan penelitian ditentukan dengan Purposive Sampling yaitu teknik menentukan informan penelitian secara sengaja atas pertimbangan tertentu, agar dapat memperoleh informasi serta data-data yang jelas dan tepat guna memperlancar proses penelitian. Selain dengan metode Purposive Sampling, peneliti juga menggunakan metode Simple Random Sampling yaitu suatu teknik penarikan sampel yang paling sederhana, karena cara pengambilan sampel ini hanya dilakukan secara acak atau cara mengundi tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi tersebut, jadi semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama menjadi sampel.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil pengisian kuesioner dan wawancara dari responden/ informan penelitian.
- b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh melalui informasi dokumentasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Data sekunder yang digunakan berupa, Laporan pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara

mendalam, observasi langsung, dokumentasi data sekunder yang erat kaitannya dengan focus penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016:101). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/ pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008:127). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan secara terstruktur. Wawancara yang dilakukan juga mengaju kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

- b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencacatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan guna melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang permasalahan yang diteliti

(Basrowi dan Suawandi, 2008:93). Aspek yang diamati peneliti meliputi, gambaran lokasi penelitian, lingkungan fisik pada umumnya, unit bantuan, proses kegiatan dalam pelaksanaan bantuan, pelaksana program dan fasilitas atau sarana lainnya yang terkait. Observasi yang dilakukan juga mengacu pada pedoman observasi yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, diperoleh dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen, foto, gambar, dan arsip perusahaan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diambil juga mengacu pada pedoman yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis data-data yang didapat dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang akan diteliti yang selanjutnya dianalisis. Data kualitatif akan

dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan mengenai bagaimana Efektifitas Penerapan Sistem E-Plannig dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan fakta dan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang di trianggulasikan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 4 (empat) bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian di mulai pada bulan September sampai dengan Desember 2021. Proses bersamaan dengan penulisan naskah penelitian berupa tesis. Prosesnya tersusun secara teoritif. Adapun jika ada perubahan yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan lapangan saat penelitian berlangsung.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. **Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk Peraturan Bupati No.03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti yang memiliki tugas membantu Bupati Kepulauan Meranti untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan. Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terletak di tepi Jalan Dorak No.45A, Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan kabupaten.
2. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan kota/kabupaten jangka panjang dan jangka menengah (lima tahun).

3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan kota/kabupaten untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
5. Melaksanakan perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kepala Daerah Kabupaten Meranti dibantu dan memberikan sebagian wewenangnya antara lain kepada Sekretaris, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik, Bidang Data dan Monitoring dan Evaluasi.

4.2. Struktur Organisasi

Setiap Organisasi haruslah mempunyai struktur yang jelas dan runtut. Ini penting dibuat, karena dengan demikian pekerjaan akan dapat dikerjakan berdasarkan pengawasan yang sudah diawasi dan dipantau sebelumnya. Dengan pengawasan ini diharapkan terjadi kelancaran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan juga ada kejelasan tanggungjawab.

Adapun pembuatan struktur ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan,

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat,

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang.

Sedangkan Struktur Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Bappeda Kabupaten Meranti (2021)

Gambar 4.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Program;
 - (2) Subbagian Keuangan; dan

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari;
 - (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - (2) Subbidang Data dan Informasi; dan
 - (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari;
 - (1) Subbidang Pemerintahan;
 - (2) Subbidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - (3) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat.
- e. Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari;
 - (1) Subbidang Perekonomian;
 - (2) Subbidang Sumberdaya Alam; dan
 - (3) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari;
 - (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - (2) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - (3) Subidang Inovasi dan Teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3. Fungsi dan Tugas Organisasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun tugas BAPPEDA berdasarkan peraturan tersebut adalah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain menyelenggarakan tugas tersebut, BAPPEDA juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bappeda Kabupaten Meranti memiliki fungsi pokok:

1. Fungsi koordinasi perencanaan Kabupaten
2. Penyediaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten

4.3.1. Uraian Tugas (Job Description) Bagian Unit Kerja BAPPEDA

Adapun uraian tugas dari masing-masing unit kerja/bidang pada Bappeda Kab. Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut ini :

- a. Kepala, mempunyai tugas dan fungsi yaitu;
 1. Bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
 2. Berfungsi memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kepulauan Meranti

3. Berfungsi mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas/Instansi lain sehubungan dengan tugas dan fungsinya.
4. Berfungsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kab. Kepulauan Meranti.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang.

- b. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan BAPPEDA. Adapun tugas dan fungsi sekretariat, yaitu:
 1. Pengoordinasian kegiatan di BAPPEDA;
 2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di BAPPEDA;
 3. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
 5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
 6. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;

8. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BAPPEDA.

Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari :

(a) Subbagian Perencanaan Program;

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Subbagian Perencanaan Program terdiri dari:

1. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis BAPPEDA;
4. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja BAPPEDA;
5. Koordinasi penyelenggara layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA; dan
6. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan BAPPEDA.

(b) Subbagian Keuangan; dan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas dan menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas Subbagian Keuangan terdiri dari:

1. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sesuai dasar pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
3. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
4. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan kelengkapan aset;
6. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

(c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi

menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas Subbaggian Umum dan Kepagawaian terdiri dari:

1. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 2. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 3. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 4. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 5. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, Subbidang Data dan Informasi, dan Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. Adapun uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

3. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi Subbidang Pemerintahan, Subbidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat. Adapun uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 3. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 4. Merencanakan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

6. Merencanakan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 7. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - dan
 8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi tugas pada Subbidang Perekonomian, Subbidang Sumberdaya Alam, dan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun uraian tugas Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan sebagian tugas-tugas badan di Subbidang Sosial dan

Pemerintahan, Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Subbidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;

4.4. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi Bappeda Kabupaten Meranti dapat di bagi sebagai berikut:

4.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai yang berkualitas dan profesional sangat diharapkan untuk mempercepat dan menjamin tercapainya tujuan dan fungsi organisasi yang ditetapkan. Lebih lanjut SDM yang handal juga merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan

oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Tabel 4.1. Pembagian ASN BAPPEDA Kepulauan Meranti berdasarkan Jabatan

No	Golongan Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II.b	7	-	-
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	4	1	5
4	Eselon IV.a	8	4	12
5	Eselon IV.b	-	-	-
6	Fungsional tertentu	-	-	-
7	Fungsional Umum	3	7	10
8	Tenaga Harian Lepas	13	8	21
	Jumlah	29	20	49

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 4.2. Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Golongan

No	Golongan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	11	10	21
3	Golongan II	1	2	3
	Jumlah	16	13	28

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 4.3. Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Jumlah
1	Laki-Laki	16	13	29
2	Perempuan	12	8	20
	Jumlah	28	21	49

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan roda organisasi BAPPEDA didukung oleh 28 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan berdasarkan komposisi laki-laki dan perempuan, terdiri dari 29 orang

ASN Laki-laki dan 20 orang ASN Perempuan.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, distribusi tingkat pendidikan ASN BAPPEDA adalah pendidikan S-2 sebanyak 7 orang (14,3%), S-1 sebanyak 21 orang (49%), kemudian pendidikan vokasi/diploma sebanyak 7 orang (14,3%), SMA sebanyak 12 orang (24,5%), SLTP 1 orang (0,5%) dan Sekolah Dasar 1 (0,5%) orang dimana semuanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA. Secara ringkas kondisi kepegawaian BAPPEDA seperti disajikan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.4. Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-	-	-
2	Strata Dua (S2)	6	1	7
3	Strata Satu (S1)	17	4	21
4	Diploma IV (D.4)	-	-	-
5	Diploma III (D.3)	4	3	7
6	Diploma II (D.2)	-	-	-
7	SLTA / Sederajat	1	11	12
8	SLTP/ Sederajat	0	1	1
9	SD/ Sederajat	0	1	1
Jumlah		28	21	49

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

4.4.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja pelayanan ASN di lingkungan Kantor BAPPEDA, sarana dan prasarana kerja di sebar di sekretariat dan bidang-bidang. Kantor BAPPEDA terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Johari

Daftar Nomor 1 dengan luas bangunan 510 m². Adapun kondisi keadaan sarana dan prasarana kerja tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kepulauan Meranti

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah	18	Papan Nama Instansi	Unit	1
1	Kendaraan Roda Empat	Unit	2	19	Papan Nama Satuan	Unit	1
2	Kendaraan Roda Dua	Unit	17	20	Kursi Putar	Unit	104
No	Deskripsi	Satuan	Jumlah	21	Kursi Tamu	Unit	4
3	Gerobak Dorong	Unit	3	22	Kursi Rapat	Unit	135
4	GPS	Unit	2	23	Kursi Lipat	Unit	1
5	Mesin Tik	Unit	2	24	Meja	Unit	83
6	Mesin Foto Copy	Unit	1	25	Meja Rapat	Unit	28
7	Lemari Besi	Unit	29	26	Karpet	Unit	2
8	Filling Kabinet	Unit	36	27	Gorden	Unit	1
9	Brankas Besi	Unit	1	28	Rak TV	Unit	2
10	Lemari kayu	Unit	15	29	Pot Bunga	Unit	30
11	Lemari Kaca	Unit	2	30	Partisi	Unit	1
12	Lemari Makanan	Unit	2	31	Kursi Ruang Tunggu	Unit	1
13	Lemari Buku	Unit	5	32	Meja Kerja Kepala Badan	Unit	1
14	Rak Besi Arsip	Unit	1	33	Meja Satpam	Unit	1
15	Whiteboard	Unit	5	34	Meja Kerja Sekretaris	Unit	1
16	Papan data	Unit	2	35	Meja Kerja kasubbid	Unit	15
17	Mesin Penghancur Kertas	Unit	5	36	Lemari Panjang	Unit	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

4.4.3. Sarana dan Prasarana pelaksanaan *e-planning* Kabupaten Meranti

Salah satu faktor pokok yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya yaitu adanya pemenuhan perlengkapan, salah satunya yaitu dalam hal urusan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, hubungan ketersediaan perlengkapan kerja yang kini secara khusus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah atau yang biasa disebut sebagai *e-planning*.



Gambar 4.2. Sarana dan Prasaran pelaksanaan *e-planning*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan *e-planning* Bappeda Kabupaten Meranti melengkapi tim teknis yaitu *programming* dengan ruangan kerja yang dilengkapi fasilitas berupa komputer, *smart tv*, *infocus* dan lainnya sesuai dengan kebutuhan tim teknis, namun demikian masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitasnya.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden

Adapun identitas responden yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan responden dan umur responden.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	6
2.	Perempuan	3
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

2. Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	0
2.	SMP	0
3.	SLTA	0
4.	Diploma	1
5.	Sarjana (S1/S2)	8
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

3. Kelompok Umur Responden

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden berdasarkan latar belakang usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)
1.	20-30	1
2.	31-40	7
3.	41-50	1
4.	>50	0
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

4. Klasifikasi Identitas Responden

Tabel 5.4. Klasifikasi Identitas Responden

No.	Pekerjaan/ Jabatan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
1.	Kasubid SDA	31-40	Sarjana (S1/S2)	Perempuan
2.	Kasubid	31-40	Sarjana (S1/S2)	Laki-laki
3.	Staff SDA	20-30	Sarjana (S1/S2)	Laki-laki
4.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	41-50	Sarjana (S1/S2)	Laki-laki
5.	Staff Pengelola Kepegawaian	31-40	Diploma	Perempuan
6.	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	31-40	Sarjana (S1/S2)	Laki-laki
7.	Kasubid Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	31-40	Sarjana (S1/S2)	Perempuan
8.	Kasubid Infrastruktur dan Kewilayahan	31-40	Sarjana (S1/S2)	Laki-laki
9.	Kasubid Pemerintahan	31-40	Sarjana (S1/S2)	Laki-laki

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

5.2. Analisis dan Hasil Penelitian

Dalam mendeskripsikan Efektivitas perencanaan pembangunan Daerah melalui aplikasi *e-planning* yang berdasarkan pada UU No.23 Tahun 2014 Pasal

391 tentang pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah mengenai informasi pembangunan dan keuangan daerah, sehingga Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan tentang pengolaan sistem informasi dalam pembangunan daerah yaitu Pemendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terdapat pada pasal 14 ayat (3) tentang penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang dilakukan secara sistem *e-planning*.

Sebagaimana dari sikap pemerintah daerah dalam menjalankan tugas tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan yang sudah dibuat tersebut, antara lain dapat dilihat dari perubahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang sebelumnya dilakukan secara manual dan kini diharapkan mampu dengan berbasis elektronik yaitu *e-planning*. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Meranti melalui aplikasi *e-planning* diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinkron dan transparan, serta membantu setiap bagian terkait dalam penerapannya tidak semata-mata hanya untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat namun untuk menciptakan perencanaan yang berkualitas, konsisten dan partisipatif selain itu juga mudah diakses, cepat, dan terintegrasi.

5.2.1. Efektivitas penerapan sistem *e-planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti

a. Dasar Hukum *e-planning* di BAPPEDA Kabupaten Meranti

Pelaksanaan *e-planning* merupakan amanat yang tertuang dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 264 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan terdapat juga pada Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak M. Sakinul Wadi selaku Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tanggal 21 November 2021 menyatakan bahwa:

*“Seperti di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 262 dijelaskan bahwa rencana pembangunan daerah itu dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkeadilan. Kan disitu kita berbicara tentang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel nah secara tidak langsung itukan berarti kita menggunakan alatkan, nah kalau kita menggunakan manual yaa kan sulit untuk kita transparan, karna bias saja kan dokumen yang kita simpan sekarang besoknya sudah hilang, karenakan pengarsipan itu juga masih suka kurang baik karena bias saja dokumen-dokumennya tidak ditemukan. Nah makanya lah ada alat bantu untuk mempermudah pekerjaan dan bias untuk pengarsipan dan mau tidak mau ya kita harus beranjak ke *e-planning* agar dapat mewujudkan rencana pembangunan seperti pada UU No.23 Tahun 2014 pasal 262”*

Dari pernyataan tersebut dapat diperkuat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang menyatakan bahwasanya dalam rencana pembangunan harus menyangkut beberapa point yang terdiri dari:

- a. Transparan, merupakan keterbukaan atas semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Atas keterbukaan tersebut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan terpenuhi. Prinsip dari transparansi tersebut menciptakan timbal-balik kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- b. Responsif, dapat diartikan bisa mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Prinsip dari responsif ialah pemerintah harus lebih peka terhadap setiap masalah yang terjadi.
- c. Efisien, merupakan pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif, ialah kemampuan dalam mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel, dapat diartikan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan pembangunan daerah yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus

komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- g. Terukur, merupakan penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dari penjabaran di yang telah di paparkan dapat dilihat dari isi salah satu pasal 262 pada UU No.23 Tahun 2014 dan juga Permendagri No.86 Tahun 2017, serta hasil dari wawancara salah satu Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Meranti yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan haruslah memenuhi beberapa poin yang telah di paparkan termasuk transparansi, responsif, efisien, efektif. Dimana dalam proses transparansi, responsif, efektif, efisien akan sulit tercapai jika tidak menggunakan alat atau masih bekerja secara manual, karena tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak di inginkan terjadi seperti

dokumen-dokumen maupun arsip yang baru saja dikerjakan dan disimpan sekarang, besok atau lusa akan hilang. Dan untuk menghindari dari kejadian yang tidak di inginkan maka sangat dibutuhkan suatu alat berupa aplikasi e-planning.

b. Penerapan dan Perkembangan Program *e-planning* sebagai Sistem Perencanaan Daerah berbasis teknologi di Bappeda Kabupaten Meranti

Latar belakang penerapan *E-Planning* ini berawal dari penggunaan cara manual dalam melakukan perencanaan dengan berbagai kekurangan misalnya dalam pencarian pekerjaan di renja membutuhkan waktu yang lama dan seringkali terjadi double data. Cara manual membuat perangkat daerah tidak mengetahui jika terdapat perubahan karena history sebelumnya tidak terekam dan terkadang terjadi ketidaksesuaian penjumlahan. Oleh karena itu, Kabupaten Meranti memutuskan untuk memutuskan untuk menggunakan Aplikasi *e-planning*. Penerapan *E-Planning* di Kabupaten Meranti didasari oleh Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem *E-Planning* Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan Sistem Perencanaan melalui Aplikasi perencanaan elektronik (*E-Planning*) agar dalam melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah serta rumusan – rumusan kebijakan dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi terarah, terpadu, sinergis, tepat sasaran serta berkelanjutan.

E-Planning memiliki Standar Operasional tersendiri diantaranya operator yang terdapat di OPD harus memahami unit kerjanya dan menguasai penggunaan teknologi informasi. Penyiapan server dan jaringan juga dibutuhkan untuk

menunjang penerapan *E-Planning* di Kabupaten Meranti. Serta diperlukan adanya pengenalan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis agar User/Operator dari seluruh OPD di Kabupaten Meranti yang menggunakan aplikasi ini dapat mengoperasikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Aplikasi *E-Planning* di Kabupaten Meranti ini merupakan sebuah kemudahan dimana Bappeda Litbang Kabupaten Meranti sebagai penyedia aplikasi *E-Planning* untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Meranti serta melakukan koordinasi dengan OPD di Seluruh Kabupaten Meranti. Dalam perumusan perencanaan daerah tentunya terdapat alur kinerja sebagai sebuah proses berjalannya perumusan perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.1. Alur Kinerja Sistem Informasi Manajemen *E-planning*

Pada gambar tersebut di jelaskan bahwa kebijakan kepala daerah untuk perencanaan mendatang telah di tentukan pada tahun sebelumnya selain menjadi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, *E-Planning* ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan program atau kegiatan OPD yang akan

dilakukan pada tahun-tahun berikutnya karena dalam aplikasi *E-Planning* terdapat histori data-data usulan yang dapat diakses sewaktu-waktu yang artinya data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan prioritas program yang sesuai dan tepat untuk diterapkan di tahun-tahun berikutnya.

Efektifitas penerapan *E-Planning* ini bisa dilihat dari perbedaan ketika masih menggunakan manual dengan saat menggunakan *E-Planning* misalnya timeline perencanaan sudah tersusun secara sistematis sehingga jika input yang dilakukan terlambat maka akan menjadi usulan di tahun berikutnya.

c. Tujuan dan Pemanfaatan Sistem *E-Planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti

Dalam pembangunan yang berhasil kemungkinan lebih besar dikarenakan perencanaan yang dibuat lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Begitu juga dengan adanya aplikasi atau system yang digunakan memiliki manfaat baik bagi banyak orang. Aplikasi *e-planning* juga memiliki banyak manfaat dan tujuan baik bagi pemerintah maupun OPD/masyarakat. Aplikasi yang dibuat dan digunakan secara online dan dapat diakses melalui link website <http://sipd.merantikab.go.id/e-planning/> sejak tahun 2017 mempunyai banyak tujuan dan manfaat dalam penggunaannya khususnya bagi Pemerintah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Meranti yang menaungi tahap dan proses dalam perencanaan daerah Kabupaten Meranti. Yang memiliki harapan dengan adanya aplikasi *e-planning* bisa dapat mempermudah dalam pekerjaan sehingga dapat menjaga konsistensi, agar apa yang telah di rencanakan atau di usulkan oleh OPD

bisa tetap konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Rifky Hanindyo yang merupakan Kasubbid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Meranti Tanggal 21 November 2021, mengatakan bahwa:

“Yang jelas tujuan utama nya adalah konsistensi, dengan adanya konsistensi perencanaan SKPD dari awal sampai akhir itu tetap sama. Kadang kan dulu disaat masih menggunakan kebijakan manual suka mengalami perubahan dalam kebijakan SKPD membuat apa yang diusulkan dalam renja kadang tidak sama dengan yang ada di simda. Motifnya atau nama kegiatannya bisa jadi beda, bisa jadi programnya juga beda. Program yang sudah dipakai tiba-tiba muncul lagi, itu dulu yang terjadi. Ketika sudah pakai e-planning otomatis kan sudah baku, ketika sudah ditetapkan kegiatan yang dilaporkan masuk dalam RPJMD ini otomatis SKPD, berarti di simda harus sama. Kalau dulu kan enggak bisa banyak yang keluar dari RPJMD, bahkan program yang sudah dipakai di RPJMD yang sekarang sudah tidak dipakai muncul lagi tiba-tiba”

Selain dalam menjaga konsistensi, penerapan aplikasi *e-planning* juga memiliki manfaat dan tujuan dalam mensinkronkan prioritas pusat dan provinsi dan daerah dapat berjalan terkoordinasi dan terstruktur dengan baik. Dan juga sebagai bentuk dari tanggungjawab atau akuntabilitas dari pihak pemerintahan kepada masyarakat. Walaupun masyarakat hanya bisa melihat atau mendapatkan informasi berupa laporan atau rekapan publikasinya saja, namun itu juga merupakan bentuk dari akuntabilitas dan transparansi dari pemerintahan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Rifky Hanindyo yang merupakan Kasubbid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Meranti Tanggal 21 November 2021, mengatakan bahwa:

“Tentu banyak sekali tujuan dan pemanfaatan e-planning ini, yang pertama dengan pelaksanaannya akan terjadi efisien dan efektivitas pekerjaan itu pasti, dikarenakan setelah adanya e-planning ini mempermudah bappeda dalam mengontrol usulan yang di usulkan oleh OPD, sehingga memudahkan kita dalam mengambil keputusan kebijakan mana yang harus di dahulukan. Yang kedua tentu

untuk sinkronisasi dan integrasi setiap program maupun kegiatan, jadi pembangunan ini kan harus sinkron dengan yang di propinsi. Dengan e-planning ini arahnya mensinkronkan, mensinergikan prioritas pusat, prioritas propinsi dan prioritas daerah itu di sinergikan jadi tegak lurus program-program pembangunan yang ada di daerah, propinsi maupun secara nasional. Dan manfaatnya lainnya dalam bentuk akuntabilitas ke publik lebih mudah. Mau dilihat silahkan boleh, tapi mungkin rekapnya saja dan mudah untuk SKPD”

Melihat dari hasil kedua wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *e-planning* ialah untuk menjaga konsistensi pengusulan program dan kegiatan agar tidak berubah-ubah, menjaga sinkronisasi prioritas antara pusat dan provinsi atau daerah, dan juga sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.

d. Efektivitas *e-planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti

Terkait efektivitas penerapan sistem *e-planning* yang merupakan program daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti, penulis dapat menguraikan pembahasannya sebagai berikut:

1. Efisiensi

Aplikasi *E-planning* ialah suatu temuan baru dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Meranti yang mempunyai banyak manfaat bagi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SKPD, maupun pihak eksekutif lainnya. Aplikasi *E-planning* yang berbentuk website memberikan kemudahan bagi perencanaan pembangunan untuk mengefisienkan waktu dalam bekerja sehingga ketepatan waktu dan anggaran dapat terkoordinasi dengan baik. *E-planning* yang dilaksanakan Kabupaten Meranti dalam penerapannya sudah mengalami peningkatan yang bisa dikatakan

sudah maksimal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ghiffar selaku Staf Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Meranti, yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapannya sudah maksimal karena sangat membantu dan mempermudah dalam penyusunan dokumen perencanaan baik segi waktu dan anggaran. Dengan kondisi geografis Kabupaten Meranti sendiri yang merupakan daerah kepulauan dapat dikatakan cukup berpengaruh terutama bagi perangkat daerah kecamatan yang berlokasi jauh dari Ibu Kota Kabupaten Meranti, sehingga mereka tidak perlu lagi bolak-balik ke Selatpanjang untuk melakukan usulan Program dan Kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Perencanaan, cukup dengan menginput usulan melalui aplikasi e-planning maka usulan tersebut sudah dapat diterima oleh Bappeda dan selanjutnya untuk dilakukan verifikasi dan validasi, tentu hal itu juga menjadi penghematan anggaran.”

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Ibu Mala selaku Kasubbid SDA Bappeda Kabupaten Meranti, menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya sudah cukup efektif dan efisien ya meskipun ada beberapa hal yang harus dikembangkan, sehingga semakin maksimal e-planning tadi. Karena perubahannya dapat dilihat dalam merumuskan rencana kerja yang sesuai dengan usulan dan peraturan yang ada.”

Sehingga berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan *e-planning* di Kabupaten Meranti yang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini sudah efektif. Meskipun ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sistem sehingga bisa lebih baik dan lebih efisien lagi.

2. Keadaptasian

Kegiatan komunikasi dilakukan Bappeda sebagai bentuk agar OPD menginginkan terjadinya kesinergisan antara anggaran dan program yang diusulkan dilakukan dengan adanya sosialisasi pengenalan program *e-planning* ini sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keadaptasian berupa fasilitas produk dan

perwujudan keinginan penerima program, sudah lebih mudah di dalam pendokumentasian serta tersinergikannya antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran yang ada.

Hal tersebut didukung oleh pendapat dari Bapak M. Sakinul Wadi selaku KabidPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Meranti, menyatakan bahwa:

“Terkait kebijakan dalam penggunaan e-planning dalam menyusun RKPD sejak tahun 2017 itu ada dilakukan sosialisasi dari BAPPEDA Kabupaten Meranti, yang dihadiri peserta seluruh OPD Kabupaten Meranti yang dilakukan sosialisasi secara langsung atau tatap muka.”

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Erwin Suhandi Staf Bappeda Kabupaten Meranti, menyatakan bahwa:

“Sosialisasi ada ya. Itu setiap tahun memang ada disosialisasikan. Karena setiap tahun ada pengembangan-pengembangan ya. Jadi selalu disosialisasikan. Untuk sosialisasi itu tatap muka secara langsung dan mungkin untuk beberapa tahun terakhir ini diadakan secara zoom meeting juga ya. Setau saya narasumber itu dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung. Peserta pastinya OPD ya se-Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Dari penuturan Erwin di atas diketahui bahwasanya sosialisasi dalam pengenalan sistem *e-Planning* dilakukan secara tatap muka pada umumnya. Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Akmal Fuadi selaku Analis Sistem Tim Pengembang Sistem *e-Planning* Bappeda Kabupaten Meranti:

“Kalau sosialisasi ada. Itu setiap tahun dan setiap ada pembaharuan fitur kita sosialisasikan ya. Untuk sosialisasi itu bisa tatap muka dan tentunya melibatkan semua OPD. Dalam sosialisasi itu tidak ada pungutan biaya. Itu dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung ya.”

Sehingga berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti selalu

mengadakan sosialisasi terkait adanya pembaruan sistem atau pembaruan fitur. Hal ini dilakukan agar pengembangan aplikasi yang dilakukan tersampaikan dengan baik kepada semua OPD dan pihak-pihak yang berkepentingan.

e. **Perbandingan perubahan sebelum dan sesudah adanya Penerepan Sistem *E-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti**

Sistem *e-planning* pasti banyak memiliki manfaat dalam penerapannya. Setelah beranjak dari penggunaan sistem manual ke sistem *e-planning* pasti mengalami perubahan sebelum dan sesudah dalam penerapan *e-planning e-planning* yang sangat signifikan. Dikarenakan perubahan-perubahan sistem dan cara kerja sangat berbeda dari manual ke *e-planning*. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak M. Sakinul Wadi selaku Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tanggal 21 November 2021 menyatakan bahwa:

“Perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penerepan sistem e-planning sangat banyak, dapat dilihat dari sisi efektifitas nya saja dalam penyusunan itu sendiri, dimana tahapan yang cukup banyak terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan itu memiliki batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, walaupun penetapan peraturan kepala daerah selalu ditetapkan tepat waktu, akan tetapi tahapan-tahapan yang harus dilalui selalu saja terjadi keterlambatan. Yang selalu menjadi penyebab keterlambatan dalam proses tahapan pengusulannya ialah Perangkat Daerah selalu terlambat dalam menghantarkan usulan Renja PD, sehingga menyebabkan kendala karena tidak tepat pada waktu dalam menghantarkan usulan Renja PD. Sehingga setelah adanya penerapan sistem e-planning tidak mengalami keterlambatan dalam pengusulan Renja PD dikarenakan setelah adanya sistem ini sudah mengikuti jadwal tahapan yang telah ditetapkan, sehingga Perangkat Daerah tidak dapat lagi mengusulkan usulan melewati waktu yang telah ditetapkan. Jika sudah waktunya habis maka otomatis beralih ke tahap berikutnya”

Pada pasal 133 ayat (2) dijelaskan bahwa Perangkat Daerah sudah menyampaikan Renja Perangkat Daerahnya paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Dan diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak M. Sakinul Wadi selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Sebelum diterapkan sistem e-planning ini yang menggunakan sistem manual Perangkat Daerah selalu saja menyampaikan Rancangan Renja PD diatas minggu ketiga bulan Maret, sehingga itu merupakan penyebab keterlambatan dalam pengusulan usulan renja, akan tetapi dengan adanya penerapan e-planning ini, PD tidak lagi bisa engusulkan pada tahapan Rancangan yang melewati minggu ketiga bulan Maret karena pada sistem ini sudah dibuat secara otomatis mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, apabila Perangkat Daerah melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka tidak dapat lagi mengusulkan usulan. Jika sudah pada waktunya sistem akan otomatis beralih ke tahap berikutnya, sehingga Perangkat Daerah sudah wajib menyelesaikan usulan sebelum waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya penerapan sistem e-planning ini mempermudah pekerjaan pada sisi efektifitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diwujudkan.”

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya penerapan e-planning sering terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam pengusulan kegiatan Renja. Sehingga setelah adanya penerapan e-planning ini membuat lebih terarah dan terkoordinasi dalam pengusulan Renja PD tepat pada waktu yang ditetapkan.

Sedangkan untuk sisi efisien anggaran umum cukup signifikan perubahan yang dialami sebelum dan sesudah adanya penerapan ini. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak M. SakinulWadi selaku Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tanggal 21 November 2021 menyatakan bahwa:

“Untuk sisi efisiensi anggaran secara umum memang cukup signifikansi dikarenakan dari sebelum menerapkan sistem e-planning ini, dimana dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sedikitnya 7 kali dan untuk perangkat daerah yang berdomisili diluar Ibukota Kabupaten itu sebanyak 7 Perangkat Daerah, sehingga mereka harus menjalankan perjalanan Dinas ke Ibukota Kabupaten, dimana jika di rata-ratakan sekali perjalanan Dinas membutuhkan biaya sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per orang. Jika dalam sekali melakukan konsultasi dilakukan oleh 2 orang dikali 7 kali perjalanan Dinas dengan 7 Perangkat Daerah yang diluar Ibukota Kabupaten, dan dalam 2 tahun dilakukan 2 kali penyusunan dokumen perencanaan yaitu anggaran murni dan anggaran perubahan, maka anggaran yang dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas saja diperkirakan sebesar Rp 176.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan setelah adanya penerapan e-planning ini membuat lebih mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas dikarenakan penginputan usulan renja dapat digunakan dimana saja”

Selain itu efisiensi dari pengeluaran biaya ATK, percetakan dan penggandaan setelah adanya penerapan e-planning ini juga mengalami perubahan dari sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh Bapak M. Sakinul Wadi selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Dari bentuk pengeluaran biaya ATK, percetakan dan penggandaan setelah adanya penerapan ini mengalami perubahan yang efisien, dimana sebelumnya seluruh Perangkat Daerah harus menyiapkan Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Dokumen Penetapan yang mana harus berupa Dokumen Hardcopy diantar langsung ke Bappeda, sedangkan untuk saat ini hanya cukup mencetak Dokumen Penetapan saja yang dapat dicetak langsung melalui sistem e-planning tersebut. Dengan demikian ada 3 jenis dokumen yang tidak perlu lagi dicetak sehingga terjadi penghematan, nah dapat kita perkiakan dari sebelumnya penerapan ini ada 34 Perangkat Daerah yang harus mengantarkan dokumen jika dirata-ratakan 1 dokumen menghabiskan biaya Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikalikan 3 rangkap dan dalam setahun dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan 2 kali maka diperkirakan terjadi penghematan sebanyak Rp 30.600.000,00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Jadi dari sisi efisiensi anggaran tentu terjadi penghematan, jika dijumlahkan kebutuhan perjalanan dinas dan biaya ATK, percetakan dan penggandaan yakni sebesar Rp 207.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah) sementara untuk kebutuhan e-planning ini sendiri, Bappeda Kabupaten Meranti menggunakan jasa 2 orang Tenaga ahli dibidang IT yang dalam sebulan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 9.500.000,00 dan dalam setahun sebesar Rp 114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah).”

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dialami dari sebelum dan sesudah adanya penerapan ini cukup signifikan dari sisi efektif dan efisiensi, dikarenakan oleh penghematan biaya yang terjadi setelah adanya penerapan *e-planning* bukan hanya penghematan biaya saja, tapi untuk waktu cukup efektif dikarenakan adanya tenggat waktu yang telah ditetapkan sehingga Perangkat Daerah tidak lalai dalam pengusulan Renja seperti sebelum adanya penerapan *e-planning* ini. Dari sebelum penerapan ini sering terjadi penghambatan dikarenakan Perangkat Daerah tidak tepat waktu menyampaikan pengusulan, sedangkan disaat adanya sistem ini tenggat waktunya ada sehingga jika terlambat tidak bisa mengisi dan lanjut ketahap berikutnya.

f. Hambatan Dalam Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti

Setiap kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah pasti memiliki faktor pendorong dan penghambat. Menurut Bapak Rahmat Hidayat, dimana faktor penghambat bukanlah menjadi hal yang menjadi persoalan namun menjadi sebuah tantangan sehingga akan lebih semangat untuk menghadapi berbagai tantangan ataupun hambatan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku Kasubbid Bappeda Kabupaten Meranti pada tanggal 21 November 2021 menyatakan bahwa:

"Penerapan sistem e-planning di BAPPEDA Kabupaten Meranti pada awal penerapannya itu dimulai pada Tahun 2017, sejak itu Perencanaan Pembangunan sudah menggunakan sistem E-Planning. Dalam penerapannya sistem sering mengalami kendala sehingga permasalahannya user tidak tepat

waktu dalam penginputan dan sinkronisasi data. Dalam penerapannya penginputan data yang dilakukan dari pihak kecamatan harus dilakukan tepat waktu sehingga cepat segera di proses, tetapi masih saja yang terlambat. Dan kurangnya interaksi/ komunikasi antara BAPPEDA Kabupaten Meranti terhadap OPD. Pada dasarnya BAPPEDA Kabupaten Meranti ini sebagai perencanaan pembangunan sebelum dilakukannya pembangunan tersebut.”

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Bapak Khairi selaku Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Meranti, menyatakan bahwa:

“Kelemahannya adalah sering muncul permasalahan pada aplikasi, misalnya server yang bermasalah dan jaringan yang tidak stabil alias lemot dalam penginputan usulan. Sehingga Perangkat Daerah Kecamatan terhambat dalam penginputan usulan yang diwajibkan untuk menginput semua usulan kegiatan dan program kerja mereka dalam seminggu, jika memiliki koneksi internet buruk harus berpindah tempat yang memiliki akses internet yang lebih baik lagi, sehingga waktunya habis untuk mengetik ulang karena lemot tadi sistem jaringannya.”

Menurut hasil wawancara diatas bahwa sistem jaringan yang tidak stabil(lemot) juga menjadi hambatan baik bagi Bappeda sendiri maupun pihak skpd yang harus menginput usulan program dan kegiatan. Karena dengan hanya waktu satu minggu semua skpd diwajibkan untuk menginput semua usulan kegiatan dan program kerja mereka, sedangkan secara otomatis apabila suatu aplikasi digunakan oleh banyak orang tidak menutup kemungkinan aplikasi yang dijalankan akan lemot, serta dibutuhkan ketelitian yang lebih agar tidak ada kesalahan yang terjadi karena usulan yang sudah diinput tidak bisa di ubah atau diperbaiki lagi.

g. Solusi untuk hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti

Menurut Bapak Rahmat Hidayat selaku Kasubbid Bappeda Kabupaten Meranti ialah:

“Sering kali terjadi kendala dalam penginputan pengusulan rencana dikarenakan kurangnya kapasitas akses, dan alangkah lebih baiknya kunci user seutuhnya sesuai dengan jadwal perencanaan yang sudah ditentukan, sehingga tidak terjadi kelebihan muatan dalam mengakses server.”

Hal tersebut merupakan solusi dari hambatan yang dialami dalam dilaksanakan penerapan sistem *e-planning* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten meranti. Dari beberapa tahun berjalan sejak tahun 2017 ada beberapa tahapan yang belum sesuai.

5.3. Pembahasan

5.3.1. Efektivitas penerapan sistem *e-planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti

a. Dasar Hukum penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kabupaten Meranti

Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah pasti memiliki landasan dasar hukum. Dasar hukum ini digunakan sebagai landasan untuk setiap penyelenggara kegiatan. Sehingga dengan adanya dasar hukum yang sah dan legal setiap penyelenggaraan kegiatan akan mempunyai aturan-aturan yang sangat kuat. Setiap penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan itu merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah atau publik yang

akan berjalan lancar dan akurat apabila kegiatan tersebut memiliki aturan yang kuat berupa landasan dasar hukum yang legal dan sah.

Berdasarkan dari aturan-aturan yang kuat itu merupakan dasar hukum yang sah dan legal, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkhusus dalam hal perencanaan yang dinaungi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti yang membuat inovasi baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Inovasi baru yang dimaksud ialah *electronic Planning* atau yang sering disebut *e-planning* yang merupakan sebuah website perencanaan pembangunan milik pemerintah Kabupaten Meranti. Inovasi dengan pemanfaatan perkembangan teknologi ini dibuat merupakan sebuah usaha untuk mencapai salah satu tujuan dari reformasi pemerintahan yang terwujudnya *good governance*. Seperti yang disampaikan oleh Efendi (Akadun, 2009:130) bahwa untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih mampu dalam menyelenggarakan *good governance* diperlukan adanya jaringan kerja sama yang di landaskan atas hubungan yang transparan, partisipatif dan responsive antar pilar-pilar.

Pemerintah Kabupaten Meranti membuat sebuah inovasi baru yang dinamakan *e-planning* dengan mengacu pada dasar hukum perencanaan yaitu UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.86 Tahun 2017. Melihat hal ini dapat dikatakan bahwa sistem *e-planning* yang diterapkan di Kabupaten Meranti pada tiga dasar hukum pusat yang sudah cukup kuat yaitu tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta

TataCara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, walaupun hal tersebut pemerintah Kabupaten Meranti tidak memiliki regulasi tersendiri dalam penerapan sistem tersebut.

b. Tujuan dan Pemanfaatan Sistem *E-Planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti

Berdasarkan dari Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan, peranan dari IT atau Informasi Teknologi ini dalam proses membuat suatu organisasi yang berusaha untuk mengimplementasikan IT agar dapat diproses yang terintegrasi dengan baik. Begitu juga dengan Bappeda Kabupaten Meranti yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk proses perencanaan pembangunan daerah. dalam proses tersebut tentunya Bappeda tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari para Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Meranti, akan hal itu sistem *e-planning* ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan proses dan tahapan perencanaan. Memudahkan proses dan tahapan yang dimaksud ialah dengan menjaga konsistensi dalam usulan program dan kegiatan agar tidak adanya perubahan sewaktu-waktu, karena apabila perubahan sering terjadi tanpa ada alasan yang jelas dan tidak disertai berita acara maka kemungkinan bisa menyebabkan penyelewangan anggaran. Selain itu untuk menjaga konsistensi dalam mensikronkan antara prioritas pusat dengan provinsi atau daerah, dapat dikatakan memberi batasan prioritas agar prioritas tersebut sejalan. Yang terakhir

ialah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atau publik. Bappeda selaku pemangku memiliki tanggungjawab kepada masyarakat atau publik, tanggungjawab tersebut haruslah didasari dengan transparansi agar tidak terjadi dugaan negatif dari masyarakat atau publik. Apabila publik merasa puas dalam akuntabilitas pemangku, maka kepercayaan tersebut akan semakin meningkat. Meskipun publik hanya mendapatkan informasi berupa laporan atau rekapannya saja, namun pihak pemangku atau Bappeda telah membuktikan bahwa dengan penerapan sistem *e-planning* ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat atau publik.

Dapat dikatakan tujuan dan manfaat dari penerapan sistem *e-planning* di Bappeda Kabupaten Meranti ada tiga ialah menjaga konsistensi dalam pengusulan program dan kegiatan, menjaga sinkronisasi antara prioritas pusat dengan prioritas provinsi atau daerah, serta menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

c. Efektivitas *e-planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti

1. Efisiensi

Pada dasarnya sistem *e-planning* ini ialah sistem yang dibuat untuk mempermudah dan memperlancar proses perencanaan pembangunan daerah. Dapat dilihat pada kutipan tulisan Setiyadi (2003) tentang manfaat sistem *e-government* yang salah satunya ialah pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Dimana koordinasi dari lembaga pemerintahan bisa dilakukan tanpa harus bertemu tatap muka atau secara langsung. Di Bappeda Kabupaten Meranti

sebelum adanya penerapan sistem *e-planning* ini para staff bekerja secara manual dalam proses perencanaan dan pembangunan. Belum lagi ketika pihak DPRD yang merupakan pengawas meminta hasil rekapan RPJMD maka Bappeda harus mencetak ulang, namun dengan sudah adanya sistem *e-planning* ini maka pihak pengawas dapat mengakses sendiri melalui website *e-planning* daerah sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak pengawas juga bisa mencetak sendiri. Selain itu juga ketika rapat diadakan dan membutuhkan data yang berkaitan dengan pengusulan program atau anggaran maka staff tidak perlu repot membuka laptop atau bahkan komputer, tetapi hanya perlu mengakses atau membuka website *e-planning* dari *handphone* masing-masing.

Selain merujuk pada tulisan Setiyadi dapat juga merujuk pada tulisan Al Gore dan Tony Blair (Indrajit, 2002:5) perihal manfaat dari *e-government* yang salah satunya ialah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dari pemerintah. Di Pemerintahan Bappeda Kabupaten Meranti setelah adanya *e-planning* maka transparansi akan semakin meningkat dan terkontrol, hal tersebut dibuktikan dengan DPRD atau Inspektorat yang selaku pengawas bisa mengontrol dan melakukan pengawasan dalam proses perencanaan dengan melihat dan memantau rekapan yang ada. Dan juga akuntabilitas atau tanggungjawab Bappeda dalam hal perencanaan dengan adanya *e-planning* dapat meningkat secara signifikan dan efektif.

2. Keadaptasian

Berdasarkan dua dimensi terkait keadaptasian yang terdiri dari dimensi kualitas produk yang dihasilkan dari adanya *e-planning* dan keadaptasian di dalam

mewujudkan keinginan dari penerima maupun pengguna sistem *e-planning*, dapat diketahui bahwa:

- a. Kualitas produk yang dihasilkan yaitu sudah terdokumentasikannya program usulan yang sudah disetujui ataupun belum disetujui.
- b. Pada aspek mewujudkan keinginan dari penerima maupun pengguna sistem *e-planning* diketahui bahwa usulan program sebagai bentuk permintaan dari OPD hanya memilih program berdasarkan alokasi kegiatan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sudah tanggap terhadap perubahan eksternal dan internal dengan mekanisme penerapan sistem *e-planning*. Sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (Tika, 2012: 129-130) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu sebagai berikut:

Keadaptasian, Keadaptasian mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan, pelanggan, kualitas produk dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai keadaptasian menunjukkan bahwa keadaptasian yang dihasilkan dari adanya *e-planning*, berupa kualitas produk yang dihasilkan seperti adanya pendokumentasian program usulan oleh Bappeda serta perwujudan tersebut yakni program yang diusulkan dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada

- d. **Perbandingan perubahan sebelum dan sesudah adanya Penerepan Sistem *E-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti**

Perubahan-perubahan yang dialami Bappeda Kabupaten Meranti setelah adanya penerapan sistem *e-planning* dapat dikatakan cukup signifikan, bisa dikatakan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan pengusulan Renja, dikarenakan sebelum adanya penerapan sistem *e-planning* sering terjadi keterlambatan yang disebabkan dari Perangkat Daerah yang telat menghantarkan tahapan-tahapan rancangan perencanaan. Sesuai dengan pasal 133 ayat (2) pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah sudah menyampaikan Renja Perangkat Daerahnya Paling lambat minggu ketiga bulan Maret, sebelum dilaksanakan sistem *e-planning* Perangkat Daerah selalu saja menyampaikan Rancangan Renja PD diatas minggu ketiga bulan Maret, inilah menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam proses perencanaan dan penyusunan. Sedangkan setelah adanya penerapan *e-planning* ini membuat Perangkat Daerah harus lebih tepat waktu dalam penginputan usulan kegiatan dikarenakan sistem yang digunakan apabila melewati tenggat waktu yang ditetapkan tidak akan bisa mengisi lagi sistem akan mengarahkan ke tahapan selanjutnya. Bukan hanya pada sisi efektifitas penerapan yang mengalami perubahan, dari sisi efisiensi juga mengalami perubahan setelah adanya penerapan *e-planning* ini ialah dengan adanya *e-planning* dapat menghemat anggaran dan tidak perlu Perangkat Daerah yang diluar dari Ibukota Kabupaten melakukan perjalanan dinas untuk menghantarkan pengusulan kegiatan ini, cukup dengan mengakses website *e-planning*. Ini membuktikan dengan adanya penerapan sistem *e-planning* bisa menghemat anggaran sekitar Rp 30.600.000,00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus

Rupiah), sedangkan sebelum adanya penerapan *e-planning* dana anggaran yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan dinas, ATK, percetakan dan penggandaan bisa menghabiskan dana sekita Rp 207.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah). Penghematan ini dikarenakan setelah adanya penerapan sistem ini Bappeda Kabupaten Meranti menggunakan jasa 2 orang Tenaga ahli dibidang IT yang dalam sebulan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Rupiah) dan dapat diakumulasikan dalam setahun sebesar Rp 114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah). Hal ini membuktikan adanya perubahan signifikan antara sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem *e-planning* pada Bappeda Kabupaten Meranti.

e. Hambatan Dalam Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Meranti

Dalam penerapan *e-government* tidaklah tanpa adanya hambatan atau tantangan. Tantangan-tantangan yang dimaksud telah disampaikan oleh Sari dan Winarno (2012:11) serta Kumorotomo (2008), tantangan tersebut bisa berupa dari aspek kepemimpinan, infrastruktur dan kepemimpinan. Begitu juga halnya dengan penerapan sistem *e-planning* yang saat ini masih mengalami beberapa hambatan atau tantangan, Faktor penghambat yang dialami adalah Sistem Jaringan yang Tidak Stabil (lemot). Menurut salah satu pegawai Bappeda Kabupaten Meranti munculnya permasalahan pada aplikasi, misalnya Server yang bermasalah jaringan internet yang belum stabil tentu saja bagi Perangkat Daerah Kecamatan yang mengalami kendala pada saat pengusulan kegiatan yang dibatasi dalam pengisian portal sehingga seringkali membuat sistem atau server down

dikarenakan pengaksesan yang berlebihan sehingga berdampak pada proses penginputan usulan dalam sistem *e-planning*. Jika Perangkat Daerah Kecamatan memiliki akses jaringan yang belum baik, tentu belum dapat mengakses sistem dikantor dan masih harus ke tempat atau daerah yang memiliki akses internet yang baik.

Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan *e-planning* namun pihak BAPPEDA tidak menganggap hal tersebut menjadi hambatan tetapi lebih kepada sebuah tantangan yang harus segera di tindaklanjuti. Dan tantangan tersebut menjadi motivasi bagi BAPPEDA untuk terus melakukan pengembangan sistem *e-planning*.

f. Solusi untuk hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Meranti

Adapun solusi dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penerapan Sistem *e-planning* adalah:

1. Perlu penambahan kapasitas server sistem, sehingga tidak lagi mengalami server down disaat kelebihan pengaksesan dan akan mempermudah Perangkat Daerah lainnya dalam menggunakan sistem *e-planning* untuk mengakses dan penginputan pengusulan rencana kerja dan kegiatan.
2. Perlu penambahan kapasitas server komputer
3. Perlu tersedianya alat pengganti membantu backup listrik/PLN jika terjadi pemadaman berkepanjangan sehingga tidak menghambat efektifitas kerja dalam menerapkan sistem *e-planning* dalam penginputan dan pengusulan rencana kerja dan kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Fokus penelitian yang telah di deskripsikan dari latar belakang menjadi pembahasan tesis agar tidak terlalu meluas, sehingga teori-teori yang telah digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan daerah sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Berawal dari fokus penelitian yang pertama yaitu mengenai Efektivitas penerapan *e-planning* dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah adalah dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerapan *e-planning* dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, dan Inovasi Daerah.

Begitupula untuk tujuan dan manfaat dari penerapan *e-planning* ialah untuk menjaga konsistensi usulan program dan kegiatan dari para OPD agar tidak berubah-ubah dan tetap menjaga konsistensi dalam pengusulan program dan kegiatan. Dalam penerapan *e-planning* juga menjaga sinkronisasi prioritas antara pusat, provinsi dan daerah, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi

kepada publik dari pihak pemangku kepentingan atau yang biasa disebut pemerintah.

Dalam penerapan *e-planning* juga memiliki strategi yaitu dengan menerapkan sistem perumpunan sehingga seluruh pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat ikut andil dalam proses perencanaan dan bekerja sama dengan para SKPD/OPD yang bersangkutan. Efektivitas penerapan *e-planning* sudah dapat dikatakan efektif dengan dibuktikan temuan-temuan penulis yang didapatkan informasi melalui hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan adalah aplikasi *e-planning* sering terjadi sistem jaringan yang tidak stabil atau lemot pada saat penginputan usulan kegiatan dan program. Hal tersebut dikarenakan pada saat pengisian usulan di portal sering mengalami kelebihan kapasitas dalam mengakses sehingga menimbulkan masalah pada sistem sehingga membuat sistem tersebut down. Dan karena jaringan yang tidak stabil membuat perangkat daerah kecamatan berebut dalam penginputan pengusulan renja yang dikarenakan waktu dalam pengisian di portal saat singkat dan bertumpukan sehingga menghambat proses penginputan usulan program dan kegiatan.

6.2. Saran

Penulis memberikan saran yang terdapat dua poin penting yang bisa dijadikan masukan dalam penerapan sistem *e-planning* dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah selanjutnya. Yang pertama ialah mempertahankan sistem perumpunan yang ada dalam bidang perencanaan sehingga dengan adanya sistem tersebut bisa menciptakan suasana

kerja secara tim yang kekeluargaan, yang nantinya akan membuat pekerjaan cepat selesai, terkoordinasi dengan baik serta akan terasa lebih ringan daripada sebelum adanya penerapan sistem *e-planning*.

Saran yang kedua yaitu sebagai tindak lanjut dari faktor penghambat dalam penerapan sistem tersebut. Faktor penghambat yang sering terjadi dikarenakan sistem jaringan yang tidak stabil atau lemot, dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis dengan beberapa Staff Bappeda Kabupaten Meranti mengatakan bahwa pada saat portal dibuka sering sekali mengalami server down yang disebabkan kelebihan muatan dalam pengaksesan yang dilakukan oleh perangkat daerah kecamatan pada saat penginputan pengusulan perencanaan dan penganggaran kegiatan.

Dalam penginputan yang diberi waktu tenggat rasanya sangat kurang efektif akan lebih baik adanya pembagian waktu sehingga tidak terjadi lagi kelebihan muatan akses dengan bergantian dalam mengakses sistem *e-planning* atau bisa dengan menambah muatan dalam mengakses sistem sehingga tidak terjadi lemot atau susah dalam menginput penyusunan rencana kerja dan kegiatan. Solusi tersebut dibuat untuk memudahkan dalam penginputan kegiatan dan lebih terkondisikan sistem jaringan yang ada tidak akan mengalami gangguan dan para pengguna tidak mengalami hambatan dan halangan dalam penggunaan sistem jaringan dikarenakan sistem sudah stabil, alhasil pekerjaanpun dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*: Bandung: Pustaka Setia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Zainal A. dan Santoso, Harry B. 2005. *Standarisasi Aplikasi e-Government untuk instansi Pemerintah Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia*. Bandung.
- Indrajit. 2006. *Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi*.
- Keban dan Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gaya Media
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- M. Steers, Richard. 2000. *Efektifitas Organisasi*, Air Langga, Jakarta.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Septi Winarsih, Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siagian dan Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan profesi*. Jakarta: Rajawali Press.

b. Artikel dan Jurnal

- Aikins, Stephen Kwemena. 2010. *E- Planning: Information Security Risks and Management Implication*, pp. 404 – 419.
- Anthopoulos, Leo G .; Siozos, Panagiotis; Tsoukalas, Ioannis A. 2007. *Applying participatory design and collaboration in digital public services for discovering and re-designing e-Government services*. *Government Information Quarterly* 24 (2007) 353–376. *Jurnal Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.*
- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35, No. 4, pp.216 — 224.
- Axelsson, Karin; Melin, Ulf; Lindgren, Ida.2010. *Exploring the importance of citizen participation and involvement in egovernment projects: Practice, incentives, and organization*. *Transforming Government: People, Process and Policy*, (4), 4, 299-321.
- Bonacin, Rodrigo; Melo, Amanda M .; Simoni, Carlos AC; Baranauskas, M. Cecília C. 2010. *Accessibility and Interoperability in e-government system: outlining an inclusive develop*. In *Universal Access In The Information Society*, g(1), pp.17-33.
- Ertiö, Titiana. 2013. *M-Participation: The Emergence of Participatory Planning Applications*. Researcher at the Department of Social Research at the University of Turku.
- Hartog, Martijn; Bakker, Kevin. 2018. *Participatory Budgeting In Public Administrations: Barrier and Oppurtunities for a transparent Government*. The Hague, Netherlands.
- Holgersson, Jesper; Söderström, Eva; Karlsson, Fredrik; Hedström, Karin. 2010. *Towards a Roadmap for User Involment in E-Government Service Development*. Sweden.
- Mishra, H .; Hiremath, BN. 2006. *Citizen-Led Participatory E-Governance Initiatives: An Architectural Perspective*, Vol. 5, Issue 2.
- Muhammad Rasuli, Ria Nelly Sari dan Virginia Ningsih. 2018. *Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*, *Jurnal Ekonomi* Vol 26, No 2, Juni 2018
- Muayyadah, Nailatul. 2020. *Strategi Penguatan Sintesa Partisipasi Masyarakat dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blora*.

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). JIAP Vol 6, No 1, pp 100-107, 2020

Oostveen, Anne-Marie and van den Besselaar, Peter. 2004. *From Small Scale to Large Scale User Participation: A Case Study of Participatory Design In E-Government Systems*, pp.173-182. *Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices*.

Poorazizi, M. Ebrahim; Steinger, Stefan; Hunter, Andrew JS. 2015. *A Service oriented Architecture to Enable Participatory Planning: an e-planning platform*. International Journal of Geographical Informan Science, Canada.

Rubiyanto. 2018. *Implementasi Kebijakan E-Government Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No. 2018

Setianingsih, Budhis. Setyowati, Endah dan Siswidiyanto. 2015. *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda), (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Brawijaya Malang.

Voss, Angi; Roeder, Stefanie; Märker, Oliver. 2003. *Optimizing Cooperation in Spatial Planning for E-Government*, pp. 239-249. Springer Berlin Heidelberg.

Yousef AM Neyazi, Yousef AM Neyazi. 2016. *Urban Planning Information Systems and E-Government in Al-Madinah*. Journal of King Abdulaziz University- Environmental Design Sciences, 10(1):149-166.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 *tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. *Tentang Tahapan, Tatat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Web

https://www.bappenas.go.id/files/8913/6508/2376/perkembangan-e-government-di-indonesia---oleh-bastian_20081223152111__1660__0.pdf, diakses pada 17 Oktober 2021 Pukul 13:00 WIB

